



WALIKOTA BUKITTINGGI
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN WALIKOTA BUKITTINGGI
NOMOR 18 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 51 TAHUN 2020
TENTANG STANDAR HARGA SATUAN PEMERINTAH KOTA BUKITTINGGI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BUKITTINGGI,

- Menimbang : a. bahwa untuk menindaklanjuti hasil evaluasi terhadap Standar Harga Satuan Pemerintah Kota Bukittinggi dan berdasarkan beberapa usulan penyesuaian Standar Harga Satuan dari beberapa Satuan Kerja Perangkat Daerah, perlu dilakukan penyempurnaan atas Peraturan Walikota Nomor 51 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Pemerintah Kota Bukittinggi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Walikota Nomor 51 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Pemerintah Kota Bukittinggi ;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 20);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
9. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Nomor 9 Tahun 2016, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Nomor 9);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 51 TAHUN 2020 TENTANG STANDAR HARGA SATUAN PEMERINTAH KOTA BUKITTINGGI.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Nomor 51 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Pemerintah Kota Bukittinggi (Berita Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2020 Nomor 53) yang telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Walikota:

- a. Nomor 9 Tahun 2021 (Berita Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2021 Nomor 19);
- b. Nomor 31 Tahun 2021 (Berita Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2021 Nomor 31);
- c. Nomor 10 Tahun 2022 (Berita Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2021 Nomor 10);

diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5) dan ayat (6) Pasal 2 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Walikota ini ditetapkan Standar Harga Satuan Pemerintah Daerah dengan memperhatikan prinsip efisiensi, efektifitas, kepatutan dan kewajaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Standar Harga Satuan yang berpedoman pada harga satuan regional, meliputi;

- a. Satuan biaya honorarium;
 - b. Satuan biaya perjalanan dinas dalam negeri;
 - c. Satuan biaya rapat/pertemuan di dalam dan di luar kantor;
 - d. Satuan biaya pengadaan kendaraan dinas; dan
 - e. Satuan biaya pemeliharaan.
- (3) Standar Harga Satuan selain yang dimaksud pada ayat (2) namun dibutuhkan dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah dengan memperhatikan prinsip efisiensi, efektifitas, kepatutan dan kewajaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, meliputi:
- a. Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen (PPK);
 - b. Honorarium Pejabat Teknis Kegiatan untuk Kegiatan Infrastruktur/ Fisik/ Konstruksi;
 - c. Honorarium Pengelola Pekerjaan Swakelola;
 - d. Honorarium Pengelola Barang Milik Daerah;
 - e. Honorarium Kegiatan lomba-Lomba;
 - f. Honorarium Pendukung Acara Seremonial/ Upacara/ Sosialisasi dan kegiatan sejenisnya;
 - g. Honorarium untuk Penyuluh dan Pendamping;
 - h. Honorarium Pendataan, Survey dan Pendistribusian/ Penyetoran dan Penilaian;
 - i. Honorarium Tim Sidang Pelanggaran Perda
 - j. Honorarium untuk Instansi Vertikal yang membantu/ mendukung program Pemerintah Daerah
 - k. Honorarium Tim Panitia Seleksi Terbuka/Evaluasi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama;
 - l. Belanja Jasa/ Upah Tenaga Kerja;
 - m. Uang Lembur;
 - n. Belanja Jasa Kantor;
 - o. Belanja Jasa Pengumuman/Publikasi;
 - p. Belanja Surat Kabar dan Majalah;
 - q. Belanja Jasa Kawat/ Faximile/ Internet;
 - r. Belanja Tagihan Telepon;
 - s. Belanja Tagihan Air;
 - t. Belanja Tagihan Listrik;
 - u. Belanja Penambahan Daya;
 - v. Belanja Jasa Pemasangan Instalasi Telepon, Air, dan Listrik;
 - w. Belanja Jasa Konsultansi;
 - x. Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara;
 - y. Belanja Jasa Penggantian Kerugian;
 - z. Belanja Paket/ Pengiriman;
 - aa. Belanja Jasa Kebersihan Ruangan;
 - bb. Belanja Sewa Ruang/ Rumah/Gedung Pertemuan;
 - cc. Belanja Sewa Lainnya Khusus Sekretariat Daerah;
 - dd. Belanja Makanan dan Minuman;
 - ee. Belanja Pakaian Dinas Khusus;
 - ff. Uang untuk diberikan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga;
 - gg. Belanja Bahan Bakar Minyak/ Gas; dan
 - hh. Belanja Jasa Rumah Sakit Umum Daerah;
- (4) Standar harga satuan Pemerintah Daerah yang berfungsi sebagai batas tertinggi yang tidak boleh dilampaui dalam perencanaan dan pelaksanaan APBD tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (5) Standar harga satuan Pemerintah Daerah yang berfungsi Sebagai Batas Tertinggi yang tidak boleh dilampaui Dalam

Perencanaan Anggaran dan satuan biaya yang berfungsi sebagai Estimasi yang merupakan batasan nilai yang dapat dilampaui Dalam Pelaksanaan APBD dengan didasarkan atas bukti pertanggungjawaban tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

- (6) Standar harga satuan Pemerintah Daerah lainnya yang dibutuhkan dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

2. Ketentuan Pasal 5 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

Honorarium Penanggung jawab Pengelola Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a dibayarkan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. jumlah keseluruhan alokasi dana untuk honorarium penanggung jawab pengelola keuangan dalam 1 (satu) tahun anggaran paling banyak 10% (sepuluh persen) dari pagu yang dikelola;
- b. Dalam hal bendahara pengeluaran menerima tunjangan fungsional bendahara, terhadap yang bersangkutan tidak diberikan honorarium penanggung jawab pengelola keuangan; dan
- c. Besaran jumlah honorarium yang diberikan, dihitung berdasarkan besaran anggaran yang dikelola oleh penanggung jawab secara individu dalam periode bulan yang berkenaan.

3. Bagian Keempat BAB II diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Bagian Keempat

Honorarium Perangkat Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa

4. Di antara Pasal 8 dan Pasal 9 ditambahkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 8A, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8A

- (1) Pemberian honorarium jasa narasumber, moderator, atau pembawa acara profesional (pakar, praktisi, atau pembicara khusus) yang mempunyai keahlian dan/atau pengalaman tertentu dalam ilmu dan/atau bidang tertentu untuk kegiatan seminar, rapat koordinasi, sosialisasi, diseminasi, dan kegiatan sejenisnya.
- (2) Pemberian honorarium jasa narasumber, moderator, atau pembawa acara professional (pakar, praktisi, atau pembicara khusus) dapat melebihi besaran standar honor narasumber, moderator, atau pembawa acara sepanjang didukung dengan bukti pengeluaran riil (pembiayaan secara at cost).

- (3) Kriteria narasumber, moderator, dan pembawa acara didukung kompetensi jabatan dan/atau kompetensi keahlian formal maupun informal.
- (4) Dalam Hal honorarium melebihi besaran diperlukan persetujuan tertulis dari Walikota yang didukung oleh kajian dari SKPD teknis dan *review* dari Inspektorat Daerah.

5. Ketentuan Pasal 33 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 33

Satuan Biaya Perjalanan Dinas Luar Negeri mempedomani Peraturan Menteri Keuangan mengenai Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran berkenaan.

6. Ketentuan Pasal 38 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 38

- (1) Satuan biaya pemeliharaan gedung atau bangunan dalam negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf e, merupakan satuan biaya yang digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya pemeliharaan rutin gedung atau bangunan di dalam negeri, guna menjaga atau mempertahankan gedung dan bangunan kantor agar tetap dalam kondisi semula, atau perbaikan dengan tingkat kerusakan kurang dari atau sama dengan 2% (dua persen) dari nilai bangunan saat ini, tidak termasuk untuk pemeliharaan gedung atau bangunan di dalam negeri yang memiliki spesifikasi khusus berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Biaya pemeliharaan gedung atau bangunan meliputi pemeliharaan gedung, atau bangunan bertingkat, pemeliharaan gedung, atau bangunan tidak bertingkat, dan pemeliharaan halaman kantor.
- (3) Satuan biaya pemeliharaan gedung atau bangunan dalam negeri dialokasikan untuk:
 - a. gedung atau bangunan milik daerah; dan/atau
 - b. gedung atau bangunan milik pihak lain yang disewa dan/atau dipinjam oleh pengguna barang dan dalam perjanjian diatur tentang adanya kewajiban bagi pengguna barang untuk melakukan pemeliharaan.
- (4) Satuan yang digunakan dalam biaya pemeliharaan gedung adalah m²/tahun.
- (5) Satuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) adalah untuk perencanaan dalam pelaksanaan hanya dibatasi dengan besaran anggaran yang tersedia.

7. Ketentuan Pasal 40 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 40

- (1) Satuan biaya pemeliharaan sarana kantor merupakan satuan biaya yang digunakan untuk :
 - a. mempertahankan barang inventaris kantor (yang digunakan langsung oleh pegawai, khususnya meja dan

- kursi), personal komputer/notebook, printer, AC split, dan genset agar berada dalam kondisi normal (beroperasi dengan baik).
 - b. Biaya pemeliharaan genset belum termasuk kebutuhan bahan bakar minyak.
 - c. Biaya Pemeliharaan printer belum termasuk kebutuhan penggantian toner.
- (2) Besaran standar pemeliharaan sarana kantor digunakan sebagai batasan tertinggi dalam perencanaan. Untuk pelaksanaan dapat kurang dan atau melebihi jumlah satuan dan harga satuan sepanjang tidak melebihi anggaran yang telah disediakan.

8. Ketentuan Pasal 41 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 41

Standar harga satuan lainnya sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (3) dapat dibayarkan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. honorarium untuk Pejabat Pembuat Komitmen untuk pengadaan barang (konstruksi), barang (non konstruksi), dan jasa (Non konstruksi) diberikan kepada Pejabat Pembuat Komitmen yang tidak merangkap menjadi Kuasa Pengguna Anggaran dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yang tidak merangkap menjadi Pejabat Teknis Kegiatan. Dalam hal rangkap rangkap jabatan di maka Pejabat Pembuat Komitmen dan/atau Pejabat Teknis Kegiatan hanya menerima salah satu honorarium.
- b. honorarium Tim Teknis Perencanaan kegiatan swakelola diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil/Non Pegawai Negeri Sipil dari SKPD teknis yang mengerjakan perencanaan untuk SKPD lain.
- c. honorarium Pengelola Barang Milik Daerah digunakan untuk membiayai belanja jasa pengelolaan BMD yang tidak menghasilkan pendapatan yang diberikan kepada pengelola barang milik daerah, pejabat penatausahaan barang, pengurus barang, pengurus barang pembantu, dan pembantu pengurus barang.
- d. honorarium Kegiatan Lomba-lomba.
 - 1) honorarium Tim Penilai/ Juri/ Wasit untuk Kegiatan yang mempergunakan Koordinator dibayarkan paling banyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) selama kegiatan.
 - 2) honorarium Tim Oficial/ Pelatih/ Atlet/ Kontingen diberikan dalam rangka:
 - a) latihan/ pemusatan latihan (*Training Center*)/ persiapan untuk mengikuti pertandingan.
 - b) mengikuti pertandingan yang dilaksanakan dalam Kota Bukittinggi.
 - c) Untuk latihan/ pemusatan latihan (*Training Center*)/ persiapan dan pertandingan yang dilaksanakan diluar Kota Bukittinggi diberikan dalam bentuk biaya perjalanan dinas sesuai dengan Lampiran I dan Lampiran II Peraturan Walikota tentang Standar Harga Satuan Pemerintah Kota Bukittinggi.

- e. Belanja Jasa Advokat Bidang TUN/Perdata/Pidana dan Belanja Jasa Pembuatan dan Perumusan Produk Hukum;
 - 1) Honorarium dibayarkan setelah adanya laporan pelaksanaan kegiatan serta melampirkan daftar hadir.
 - 2) Jumlah tim dan anggota ditetapkan dengan Surat Keputusan; dan
 - 3) Pemberian jasa advokat, jasa konsultasi hukum dan jasa pembuatan dan perumusan produk hukum dapat melebihi besaran standar harga satuan yang telah ditetapkan sepanjang didukung dengan bukti pengeluaran riil (pembiayaan secara *at cost*). Dalam Hal honorarium melebihi besaran diperlukan persetujuan tertulis dari Walikota yang didukung oleh kajian dari SKPD teknis dan review dari Inspektorat Kota Bukittinggi.
- f. honorarium Pendataan, Survey dan Pendistribusian/ Penyetoran;
 - 1) Form isian yang dimaksud adalah lembaran form yang terdiri dari item pertanyaan/variabel data yang dientrikan ke aplikasi.
 - 2) Honorarium dapat dibayarkan dengan melampirkan hasil cetak laporan entrian data dari aplikasi yang dimaksud.
 - 3) Honorarium Pendistribusian dan Penyetoran Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) Pajak Bumi dan Bangunan-P2 diberikan kepada petugas pendistribusian dan pengembalian blanko SPPT Pajak Bumi dan Bangunan -P2 petugas penyerahan dan pengembalian blanko SPPT untuk disetorkan.
- g. honorarium untuk Instansi Vertikal yang membantu/ mendukung program Pemerintah Daerah untuk Kegiatan program Pemerintah Daerah yang bersifat Insidentil dibayarkan untuk kegiatan yang dilaksanakan harian.
- h. Belanja jasa upah pegawai kontrak.
 - 1) Ketentuan disiplin dan cuti tenaga kontrak/honorer berpedoman kepada aturan disiplin dan cuti Pegawai Negeri Sipil.
 - 2) Pegawai Kontrak untuk Pekerjaan Beresiko merupakan pegawai kontrak sebagaimana poin 1 yang dalam pekerjaannya mempunyai resiko fisik yaitu:
 - a) Pegawai Kontrak yang bertugas dalam Operasional Ketentrangan dan Ketertiban Umum pada Dinas Satuan Polisi Pamong Praja.
 - b) Pegawai Kontrak yang bertugas dalam Operasional Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan lainnya pada Dinas Kebakaran.
 - c) Pegawai Kontrak yang bertugas dalam Operasional Pengelolaan Sampah dan Pemothon Rumput/Pohon pada Dinas Lingkungan Hidup.
 - d) Pegawai Kontrak yang bertugas sebagai *Keeper* dan *Maintenance* pada Taman Margasatwa dan Budaya Kinantan pada Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga.
 - e) Pegawai Kontrak yang bertugas sebagai petugas lapangan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.
 - f) Pegawai Kontrak yang bertugas sebagai petugas penanggulangan bencana pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

- g) Pegawai Kontrak yang bertugas sebagai Juru Sembelih pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Rumah Potong Hewan Dinas Pertanian dan Pangan.
 - h) Pegawai Kontrak Dokter Umum dan Penata Anestesi pada Rumah Sakit Umum Daerah Kota Bukittinggi.
 - i) Pegawai Kontrak yang bertugas sebagai petugas lapangan pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
- 3) Pegawai kontrak yang mempunyai beban kerja lebih adalah:
 - a) Pegawai kontrak pada Badan Keuangan.
 - b) Pegawai kontrak pada Tata Usaha Walikota, Tata Usaha Wakil Walikota, Tata Usaha Sekretaris Daerah, Tata Usaha Asisten, Ajudan Walikota, Ajudan Wakil Walikota, Sopir Walikota, Sopir Wakil Walikota, Sopir Sekretaris Daerah, Sopir Rumah Dinas Walikota, Sopir Rumah Dinas Wakil Walikota dan Petugas serta Pembantu Rumah Dinas Non Pegawai Negeri Sipil, Staf Protokol Non Pegawai Negeri Sipil.
 - 4) Upah Kerja adalah hak pekerja atau karyawan yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pemberi kerja kepada pekerja yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan atau peraturan perundang-undangan.
 - 5) Upah Kerja Pegawai Kontrak dibayarkan berdasarkan kehadiran.
 - 6) Pemotongan gaji dimaksud sesuai dengan yang disepakati dalam Surat Perjanjian Kerja.
 - 7) Hari kerja adalah Senin sampai dengan Jumat atau sesuai dengan kesepakatan/ kebutuhan Kegiatan SKPD yang bersangkutan.
 - 8) Isi Perjanjian Kontrak Kerja disesuaikan dengan Indikator kinerja dan jenis pekerjaan yang bersangkutan.
 - 9) Pembayaran Gaji/ Upah Pegawai Kontrak mempertimbangkan besaran Upah Minimum Provinsi yang ditetapkan oleh Gubernur.
 - 10) Tunjangan/ uang kesejahteraan pegawai kontrak.
 - a) Tunjangan guru non ASN pada satuan pendidikan tingkat PAUD, TK, SD sederajat, SLTP sederajat di wilayah Kota Bukittinggi dan pegawai tidak tetap/ kontrak yang diperbantukan pada Pemerintah Kota Bukittinggi yang diangkat oleh Menteri/ Gubernur, diberikan kepada Guru Swasta dan Negeri yang tergabung dalam Ikatan Guru Honor Indonesia (IGHI) atau organisasi sejenisnya pada Wilayah Kota Bukittinggi.
 - b) Uang Kesejahteraan Tahunan bagi Guru Non PNS pada satuan pendidikan tingkat PAUD, TK, SD sederajat, SLTP sederajat di wilayah Kota Bukittinggi dan Pegawai harian yang diangkat oleh Walikota Bukittinggi, dikontrak oleh Pimpinan SKPD di Lingkungan Pemerintah Kota Bukittinggi;
- i. Uang Lembur;
 1. Ketentuan lebih lanjut tentang pelaksanaan lembur dan pemberian uang makan lembur diatur dengan Peraturan Walikota tersendiri.

2. Uang lembur hari kerja/ hari libur biasa dapat diberikan pada PNS/ Non PNS yang melakukan kerja lembur diluar jam kerja untuk kepentingan dinas.
3. Uang makan lembur dapat diberikan kepada PNS/ Non PNS dalam rangka tugas pokok dan fungsi petugas lapangan/ operasional yaitu:
 - a) Tugas-tugas operasional ketentraman dan ketertiban Umum pada Dinas Satuan Polisi Pamong Praja.
 - b) Tugas-tugas operasional pada Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan lainnya pada Dinas Kebakaran.
 - c) Tugas-tugas operasional pada pengelolaan sampah, taman dan pemotong rumput/pohon pada Dinas Lingkungan Hidup.
 - d) Tugas-tugas operasional objek wisata dan sarana olah raga pada Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga.
 - e) Tugas-tugas operasional pada perbengkelan, lampu jalan, pemeliharaan jalan/ jembatan, irigasi dan drainase.
 - f) Tugas-tugas operasional penanggulangan bencana pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah.
 - g) Tugas-tugas operasional pengendalian lalu lintas dan jalan raya, terminal dan parkir pada Dinas Perhubungan.
 - h) Tugas-tugas operasional rumah potong hewan, pusat kesehatan hewan, BBIH dan pemeliharaan kuda bibit pada Dinas Pertanian dan Pangan.
 - i) Tugas-tugas operasional perpustakaan keliling pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan.
 - j) Tugas-tugas operasional kedewanan pada Sekretariat DPRD.
 - k) Tugas-tugas operasional Tata Usaha Pimpinan (TUP) dan tugas-tugas operasional Pantap pada Sekretariat Daerah.
 - l) Tugas-tugas operasional pemungutan pajak daerah dan tugas-tugas administrasi pengelolaan keuangan yang dilaksanakan oleh pegawai Non PNS pada Badan Keuangan.
 - m) Tugas-tugas operasional Rumah Kelahiran Bung Hatta dan Rumah Adat Nan Baanjuang pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.
 - n) Tugas-tugas Operasional Lapangan pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan.
4. Kerja lembur yang dimaksud merupakan kerja dalam rangka tugas pokok dan fungsi bagi petugas lapangan dan tidak termasuk kerja dalam rangka kepentingan kegiatan.
5. Uang lembur dapat diberikan untuk kerja lembur setiap kali selama paling sedikit satu jam penuh dan Uang Makan Lembur dapat diberikan apabila telah melaksanakan kerja lembur minimal 2 (dua) jam perhari.
6. Kerja lembur yang dilaksanakan pada hari kerja melebihi 3 (tiga) jam sehari, pembayaran uang lembur paling banyak diberikan untuk 3 (tiga) jam kerja lembur.
7. Uang lembur untuk hari libur dan hari libur khusus diberikan dalam satuan orang per jam dengan uang makan lembur diberikan 1 (satu) kali.
8. Dalam hal petugas lapangan yang melaksanakan lembur dan mendapatkan uang makan lembur, maka makan lembur tidak dapat diberikan lagi.

9. Uang lembur khusus pada hari-hari tertentu diberikan dalam rangka lembur pada cuti bersama hari raya keagamaan sesuai ketentuan pemerintah.

j. Belanja Sewa Ruang/ Rumah/Gedung Pertemuan;

1. Ruangan Rapat Hotel / Gedung Pertemuan Kapasitas Kecil adalah ruangan dengan kapasitas sampai dengan 50 (lima puluh) orang.
2. Ruangan Rapat Hotel / Gedung Pertemuan Kapasitas Sedang adalah ruangan dengan kapasitas sampai dengan 200 (dua ratus) orang.
3. Ruangan Rapat Hotel / Gedung Pertemuan Kapasitas Besar adalah ruangan dengan kapasitas diatas 200 (dua ratus) orang.

k. Belanja Makanan dan Minuman;

Belanja makanan dan minuman belanja yang digunakan untuk membiayai makanan dan minuman dalam rangka pelaksanaan kegiatan, yaitu: (a) rapat, lembur, pertemuan, sosialisasi, bimtek, diklat, dan sejenisnya; (b) jamuan tamu; (c) penambah daya tahan tubuh (d) pada fasilitas pelayanan urusan pendidikan, (e) pada fasilitas pelayanan urusan kesehatan, (f) pada fasilitas pelayanan urusan sosial, dan (g) aktivitas lapangan. Ketentuan belanja makanan dan minuman adalah sebagai berikut:

1. Makanan dan minuman rapat/pertemuan/diklat/tamu/ kegiatan diberikan kepada kegiatan yang pesertanya melibatkan sekurang-kurangnya eselon II.
 2. Makan dengan nasi kotak lengkap diperuntukkan untuk menjamu tamu kedinasan.
 3. Makan dan snack dengan jasa katering diperuntukkan untuk kegiatan diklat/tamu.
 4. Snack biasa diperuntukkan untuk kegiatan rapat/ penyuluhan/sosialisasi dan sejenisnya.
 5. Snack sedang/snack dengan menggunakan jasa katering dan snack berat diperuntukkan untuk kegiatan DPRD.
 6. Minum diberikan hanya untuk khusus lembur.
 7. Dalam hal lembur telah diberikan uang makan lembur, maka makan dan minum lembur tidak diberikan lagi.
 8. Makanan dan minuman harian/lembur dapat dicairkan dengan memberikan kupon/voucher rumah makan atau restoran kepada pegawai yang melaksanakan lembur.
 9. Biaya Konsumsi diperuntukkan bantuan konsumsi berupa snack untuk lokasi tujuan *Field Trip*.
1. Uang/barang untuk diberikan kepada masyarakat/pihak ketiga;
1. Penghargaan/ reward bagi peserta lomba yang berprestasi dalam mewakili Kota Bukittinggi pada lomba tingkat Provinsi/Nasional/Internasional.
 2. Hadiah lomba tingkat Kota/Provinsi/Nasional dalam rangka kegiatan yang diadakan oleh SKPD yang bersifat Insidentil.
 3. Kelurahan diberikan apabila pencapaian target penerimaan Pajak Bumi Bangunan-P2 pada bulan September realisasi penerimaan 100% dengan wajib pajak 65%, sesuai dengan lampiran.
 4. Kelurahan diberikan apabila pencapaian target penerimaan Pajak Bumi Bangunan-P2 pada bulan

November realisasi penerimaan 100% dengan wajib pajak 65%, sesuai dengan lampiran.

5. Kecamatan pencapaian target Pajak Bumi Bangunan-P2 Pada bulan September realisasi penerimaan 100% dengan wajib pajak 65%, sesuai dengan lampiran.

6. Kecamatan pencapaian target Pajak Bumi Bangunan-P2 Pada bulan November realisasi penerimaan 100% dengan wajib pajak 65%, sesuai dengan lampiran.

m. Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas

1. Bahan Bakar Minyak Operasional/ Mobilitas Rutin Bulanan

a) Indek sebagaimana tercantum pada lampiran merupakan Indeks estimasi kebutuhan Bahan Bakar Minyak per-hari kerja dalam 1 (bulan) kalender. Realisasi berdasarkan kehadiran. Jumlah hari kerja sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing SKPD

b) Bendahara adalah Bendahara Pengeluaran, Bendaharawan Penerimaan, Bendahara Pengeluaran Pembantu, Pembantu Bendahara, Bendaharawan Penerimaan Pembantu.

c) Pengurus Barang adalah Pengurus Barang/Surat Berharga dan Pengurus Barang Pembantu.

d) Penggunaan jenis Bahan Bakar Minyak disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Operasional/ Mobilitas Terkait Dengan Kegiatan SKPD (Non Rutin Bulanan)

a) Maksimal diberikan 1 (satu) kali dalam satu hari pada saat pelaksanaan operasional/ mobilitas kegiatan.

b) Indeks sebagaimana tercantum pada Lampiran tidak diperuntukkan bagi satuan kendaraan pemadam kebakaran, penanggulangan bencana, polisi pamong praja, Truck Roda 6 (enam) dan Alat Berat pada Dinas Pekerjaan Umum (dalam hal pelaksanaan operasi penertiban dan Operasional Pekerjaan Umum, truk pengangkutan sampah, dan ambulan).

c) Indeks BBM sebagaimana dimaksud Lampiran disesuaikan dengan kebutuhan, dengan memperhatikan aspek kepatutan dan kewajaran serta efisiensi.

9. Ketentuan Ayat (3) pasal 41A diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 41A

(1) Dalam hal standar harga satuan lain yang dibutuhkan tidak tercantum dalam Lampiran Peraturan Walikota ini, SKPD dapat menggunakan standar harga satuan lain yang ditetapkan Pemerintah Pusat, Kementerian/Lembaga, Pemerintah Provinsi dan Badan/Lembaga Non Pemerintah Nirlaba berbadan hukum Indonesia, yang disertai dengan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak yang ditandatangani oleh Pengguna Anggaran yang bersangkutan.

(2) Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) merupakan bentuk

pertanggungjawaban pengguna anggaran atas penggunaan standar harga satuan lainnya.

- (3) Format Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bukittinggi.

Ditetapkan di Bukittinggi
pada tanggal 14 Juli 2022

WALIKOTA BUKITTINGGI,

dto

ERMAN SAFAR

Diundangkan di Bukittinggi
pada tanggal 14 Juli 2022

SEKRETARIS DAERAH KOTA BUKITTINGGI,

dto

MARTIAS WANTO

BERITA DAERAH KOTA BUKITTINGGI TAHUN 2022 NOMOR 19

STANDAR HARGA SATUAN PEMERINTAH KOTA BUKITTINGGI
YANG BERFUNGSI SEBAGAI BATAS TERTINGGI DALAM PERENCANAAN DAN PELAKSANAAN APBD

A. SATUAN BIAYA HONORARIUM

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp.)
1.1.	HONORARIUM PENANGGUNG JAWAB PENGELOLA KEUANGAN		
	1.1.1. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD)/Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)		
	a. Nilai pagu dana s.d. Rp 100 Juta	OB	780,000.00
	b. Nilai pagu dana di atas Rp.100 Juta sd. Rp.250 Juta	OB	937,500.00
	c. Nilai pagu dana di atas Rp.250 Juta sd. Rp.500 Juta	OB	1,087,500.00
	d. Nilai pagu dana di atas Rp.500 Juta sd. Rp.1 Miliar	OB	1,245,000.00
	e. Nilai pagu dana di atas Rp.1 Miliar sd. Rp.2,5 Miliar	OB	1,477,500.00
	f. Nilai pagu dana di atas Rp.2,5 Miliar sd. Rp.5 Miliar	OB	1,710,000.00
	g. Nilai pagu dana di atas Rp.5 Miliar sd. Rp.10 Miliar	OB	1,942,500.00
	h. Nilai pagu dana di atas Rp.10 Miliar sd. Rp.25 Miliar	OB	2,257,500.00
	i. Nilai pagu dana di atas Rp.25 Miliar sd. Rp.50 Miliar	OB	2,565,000.00
	j. Nilai pagu dana di atas Rp.50 Miliar sd. Rp.75 Miliar	OB	2,880,000.00
	k. Nilai pagu dana di atas Rp.75 Miliar sd. Rp.100 Miliar	OB	3,187,500.00
	l. Nilai pagu dana di atas Rp.100 Miliar sd. Rp.250 Miliar	OB	3,577,500.00
	m. Nilai pagu dana di atas Rp.250 Miliar sd. Rp.500 Miliar	OB	3,967,500.00
	n. Nilai pagu dana di atas Rp.500 Miliar sd. Rp.750 Miliar	OB	4,357,500.00
	o. Nilai pagu dana di atas Rp.750 Miliar sd. Rp.1 Triliun	OB	4,747,500.00
	p. Nilai pagu dana di atas Rp.1 Triliun	OB	5,527,500.00
	1.1.2. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)		
	a. Nilai pagu dana s.d. Rp 100 Juta	OB	757,500.00
	b. Nilai pagu dana di atas Rp.100 Juta sd. Rp.250 Juta	OB	907,500.00
	c. Nilai pagu dana di atas Rp.250 Juta sd. Rp.500 Juta	OB	1,057,500.00
	d. Nilai pagu dana di atas Rp.500 Juta sd. Rp.1 Miliar	OB	1,207,500.00
	e. Nilai pagu dana di atas Rp.1 Miliar sd. Rp.2,5 Miliar	OB	1,432,500.00
	f. Nilai pagu dana di atas Rp.2,5 Miliar sd. Rp.5 Miliar	OB	1,657,500.00
	g. Nilai pagu dana di atas Rp.5 Miliar sd. Rp.10 Miliar	OB	1,890,000.00
	h. Nilai pagu dana di atas Rp.10 Miliar sd. Rp.25 Miliar	OB	2,190,000.00
	i. Nilai pagu dana di atas Rp.25 Miliar sd. Rp.50 Miliar	OB	2,490,000.00
	j. Nilai pagu dana di atas Rp.50 Miliar sd. Rp.75 Miliar	OB	2,790,000.00
	k. Nilai pagu dana di atas Rp.75 Miliar sd. Rp.100 Miliar	OB	3,097,500.00
	l. Nilai pagu dana di atas Rp.100 Miliar sd. Rp.250 Miliar	OB	3,472,500.00
	m. Nilai pagu dana di atas Rp.250 Miliar sd. Rp.500 Miliar	OB	3,847,500.00
	n. Nilai pagu dana di atas Rp.500 Miliar sd. Rp.750 Miliar	OB	4,230,000.00
	o. Nilai pagu dana di atas Rp.750 Miliar sd. Rp.1 Triliun	OB	4,605,000.00
	p. Nilai pagu dana di atas Rp.1 Triliun	OB	5,355,000.00
	1.1.3. Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (PPK SKPD)/PPK Unit		
	a. Nilai pagu dana s.d. Rp 100 Juta	OB	300,000.00
	b. Nilai pagu dana di atas Rp.100 Juta sd. Rp.250 Juta	OB	360,000.00
	c. Nilai pagu dana di atas Rp.250 Juta sd. Rp.500 Juta	OB	427,500.00
	d. Nilai pagu dana di atas Rp.500 Juta sd. Rp.1 Miliar	OB	495,000.00
	e. Nilai pagu dana di atas Rp.1 Miliar sd. Rp.2,5 Miliar	OB	577,500.00
	f. Nilai pagu dana di atas Rp.2,5 Miliar sd. Rp.5 Miliar	OB	660,000.00
	g. Nilai pagu dana di atas Rp.5 Miliar sd. Rp.10 Miliar	OB	742,500.00
	h. Nilai pagu dana di atas Rp.10 Miliar sd. Rp.25 Miliar	OB	937,500.00
	i. Nilai pagu dana di atas Rp.25 Miliar sd. Rp.50 Miliar	OB	1,140,000.00
	j. Nilai pagu dana di atas Rp.50 Miliar sd. Rp.75 Miliar	OB	1,335,000.00

	k. Nilai pagu dana di atas Rp.75 Miliar sd. Rp.100 Miliar	OB	1,530,000.00
	l. Nilai pagu dana di atas Rp.100 Miliar sd. Rp.250 Miliar	OB	1,830,000.00
	m. Nilai pagu dana di atas Rp.250 Miliar sd. Rp.500 Miliar	OB	2,122,500.00
	n. Nilai pagu dana di atas Rp.500 Miliar sd. Rp.750 Miliar	OB	2,422,500.00
	o. Nilai pagu dana di atas Rp.750 Miliar sd. Rp.1 Triliun	OB	2,715,000.00
	p. Nilai pagu dana di atas Rp.1 Triliun	OB	3,315,000.00
	1.1.4. Bendahara Pengeluaran atau Bendahara Penerimaan		
	a. Nilai pagu dana s.d. Rp 100 Juta	OB	340,000.00
	b. Nilai pagu dana di atas Rp.100 Juta sd. Rp.250 Juta	OB	420,000.00
	c. Nilai pagu dana di atas Rp.250 Juta sd. Rp.500 Juta	OB	500,000.00
	d. Nilai pagu dana di atas Rp.500 Juta sd. Rp.1 Miliar	OB	570,000.00
	e. Nilai pagu dana di atas Rp.1 Miliar sd. Rp.2,5 Miliar	OB	670,000.00
	f. Nilai pagu dana di atas Rp.2,5 Miliar sd. Rp.5 Miliar	OB	770,000.00
	g. Nilai pagu dana di atas Rp.5 Miliar sd. Rp.10 Miliar	OB	860,000.00
	h. Nilai pagu dana di atas Rp.10 Miliar sd. Rp.25 Miliar	OB	1,090,000.00
	i. Nilai pagu dana di atas Rp.25 Miliar sd. Rp.50 Miliar	OB	1,320,000.00
	j. Nilai pagu dana di atas Rp.50 Miliar sd. Rp.75 Miliar	OB	1,550,000.00
	k. Nilai pagu dana di atas Rp.75 Miliar sd. Rp.100 Miliar	OB	1,780,000.00
	l. Nilai pagu dana di atas Rp.100 Miliar sd. Rp.250 Miliar	OB	2,120,000.00
	m. Nilai pagu dana di atas Rp.250 Miliar sd. Rp.500 Miliar	OB	2,470,000.00
	n. Nilai pagu dana di atas Rp.500 Miliar sd. Rp.750 Miliar	OB	2,810,000.00
	o. Nilai pagu dana di atas Rp.750 Miliar sd. Rp.1 Triliun	OB	3,160,000.00
	p. Nilai pagu dana di atas Rp.1 Triliun	OB	3,840,000.00
	1.1.5. Bendahara Pengeluaran Pembantu, Bendahara Penerimaan Pembantu, Bendahara BLUD dan Bendahara BOS		
	a. Nilai pagu dana s.d. Rp 100 Juta	OB	260,000.00
	b. Nilai pagu dana di atas Rp.100 Juta sd. Rp.250 Juta	OB	310,000.00
	c. Nilai pagu dana di atas Rp.250 Juta sd. Rp.500 Juta	OB	370,000.00
	d. Nilai pagu dana di atas Rp.500 Juta sd. Rp.1 Miliar	OB	430,000.00
	e. Nilai pagu dana di atas Rp.1 Miliar sd. Rp.2,5 Miliar	OB	500,000.00
	f. Nilai pagu dana di atas Rp.2,5 Miliar sd. Rp.5 Miliar	OB	570,000.00
	g. Nilai pagu dana di atas Rp.5 Miliar sd. Rp.10 Miliar	OB	640,000.00
	h. Nilai pagu dana di atas Rp.10 Miliar sd. Rp.25 Miliar	OB	810,000.00
	i. Nilai pagu dana di atas Rp.25 Miliar sd. Rp.50 Miliar	OB	980,000.00
	j. Nilai pagu dana di atas Rp.50 Miliar sd. Rp.75 Miliar	OB	1,150,000.00
	k. Nilai pagu dana di atas Rp.75 Miliar sd. Rp.100 Miliar	OB	1,330,000.00
	l. Nilai pagu dana di atas Rp.100 Miliar sd. Rp.250 Miliar	OB	1,580,000.00
	m. Nilai pagu dana di atas Rp.250 Miliar sd. Rp.500 Miliar	OB	1,840,000.00
	n. Nilai pagu dana di atas Rp.500 Miliar sd. Rp.750 Miliar	OB	2,090,000.00
	o. Nilai pagu dana di atas Rp.750 Miliar sd. Rp.1 Triliun	OB	2,350,000.00
	p. Nilai pagu dana di atas Rp.1 Triliun	OB	2,860,000.00
	1.2. HONORARIUM PENGADAAN BARANG / JASA		
	1.2.1. Honorarium Pejabat Pengadaan Barang / Jasa	OP	510,000.00
	1.2.2. Honorarium Kelompok Kerja Pemilihan Pengadaan Barang / Jasa		
	1.2.2.1. Honorarium Kelompok Kerja Pemilihan Pengadaan Barang / Jasa (Konstruksi)		
	a. Nilai pagu pengadaan sampai dengan Rp 200 Juta	OP	510,000.00
	b. Nilai pagu pengadaan di atas Rp.200 Juta sd. Rp.500 Juta	OP	637,500.00
	c. Nilai pagu pengadaan di atas Rp.500 Juta sd. Rp.1 Miliar	OP	765,000.00
	d. Nilai pagu pengadaan di atas Rp.1 Miliar sd. Rp.2,5 Miliar	OP	952,500.00
	e. Nilai pagu pengadaan di atas Rp.2,5 Miliar sd. Rp.5 Miliar	OP	1,140,000.00
	f. Nilai pagu pengadaan di atas Rp.5 Miliar sd. Rp.10 Miliar	OP	1,335,000.00
	g. Nilai pagu pengadaan di atas Rp.10 Miliar sd. Rp.25 Miliar	OP	1,590,000.00
	h. hNilai pagu pengadaan di atas Rp.25 Miliar sd. Rp.50 Miliar	OP	1,837,500.00
	i. Nilai pagu pengadaan di atas Rp.50 Miliar sd. Rp.75 Miliar	OP	2,092,500.00
	j. Nilai pagu pengadaan di atas Rp.75 Miliar sd. Rp.100 Miliar	OP	2,347,500.00

	k. Nilai pagu pengadaan di atas Rp.100 Miliar sd. Rp.250 Miliar	OP	2,685,000.00
	l. Nilai pagu pengadaan di atas Rp.250 Miliar sd. Rp.500 Miliar	OP	3,022,500.00
	m. Nilai pagu pengadaan di atas Rp.500 Miliar sd. Rp.750 Miliar	OP	3,367,500.00
	n. Nilai pagu pengadaan di atas Rp.750 Miliar sd. Rp.1 Triliun	OP	3,705,000.00
	o. Nilai pagu pengadaan di atas Rp.1 Triliun	OP	4,170,000.00
	1.2.2.2. Honorarium Kelompok Kerja Pemilihan Pengadaan Barang / Jasa untuk pengadaan Barang (Nonkonstruksi)		
	a. Nilai pagu pengadaan sampai dengan Rp 200 Juta	OP	570,000.00
	b. Nilai pagu pengadaan di atas Rp.200 Juta sd. Rp.500 Juta	OP	570,000.00
	c. Nilai pagu pengadaan di atas Rp.500 Juta sd. Rp.1 Miliar	OP	690,000.00
	d. Nilai pagu pengadaan di atas Rp.1 Miliar sd. Rp.2,5 Miliar	OP	855,000.00
	e. Nilai pagu pengadaan di atas Rp.2,5 Miliar sd. Rp.5 Miliar	OP	1,027,500.00
	f. Nilai pagu pengadaan di atas Rp.5 Miliar sd. Rp.10 Miliar	OP	1,200,000.00
	g. Nilai pagu pengadaan di atas Rp.10 Miliar sd. Rp.25 Miliar	OP	1,432,500.00
	h. Nilai pagu pengadaan di atas Rp.25 Miliar sd. Rp.50 Miliar	OP	1,657,500.00
	i. Nilai pagu pengadaan di atas Rp.50 Miliar sd. Rp.75 Miliar	OP	1,890,000.00
	j. Nilai pagu pengadaan di atas Rp.75 Miliar sd. Rp.100 Miliar	OP	2,115,000.00
	k. Nilai pagu pengadaan di atas Rp.100 Miliar sd. Rp.250 Miliar	OP	2,422,500.00
	l. Nilai pagu pengadaan di atas Rp.250 Miliar sd. Rp.500 Miliar	OP	2,730,000.00
	m. Nilai pagu pengadaan di atas Rp.500 Miliar sd. Rp.750 Miliar	OP	3,030,000.00
	n. Nilai pagu pengadaan di atas Rp.750 Miliar sd. Rp.1 Triliun	OP	3,337,500.00
	o. Nilai pagu pengadaan di atas Rp.1 Triliun	OP	3,757,500.00
	1.2.2.3. Honorarium Kelompok Kerja Pemilihan Pengadaan Barang/Jasa untuk pengadaan Barang/Jasa Untuk Jasa Konsultansi/Jasa lainnya (Nonkonstruksi)		
	a. Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi Rp.50 Juta	OP	337,500.00
	b. Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi di atas Rp.50 Juta sd. Rp.100 Juta	OP	337,500.00
	c. Nilai pagu pengadaan jasa lainnya s.d Rp.100 Juta	OP	337,500.00
	d. Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya di atas Rp.100 Juta sd. Rp.250 Juta	OP	360,000.00
	e. Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya di atas Rp.250 Juta sd. Rp.500 Juta	OP	450,000.00
	f. Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya di atas Rp.500 Juta sd. Rp.1 Miliar	OP	540,000.00
	g. Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya di atas Rp.1 Miliar sd. Rp.2,5 Miliar	OP	682,500.00
	h. Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya di atas Rp.2,5 Miliar sd. Rp.5 Miliar	OP	817,500.00
	i. Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya di atas Rp.5 Miliar sd. Rp.10 Miliar	OP	952,500.00
	j. Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya di atas Rp.10 Miliar sd. Rp.25 Miliar	OP	1,132,500.00
	k. Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya di atas Rp.25 Miliar sd. Rp.50 Miliar	OP	1,312,500.00
	l. Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya di atas Rp.50 Miliar sd. Rp.75 Miliar	OP	1,492,500.00
	m. Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya di atas Rp.75 Miliar sd. Rp.100 Miliar	OP	1,672,500.00
	n. Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya di atas Rp.100 Miliar sd. Rp.250 Miliar	OP	1,920,000.00
	o. Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya di atas Rp.250 Miliar sd. Rp.500 Miliar	OP	2,160,000.00
	p. Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya di atas Rp.500 Miliar sd. Rp.750 Miliar	OP	2,400,000.00
	q. Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya di atas Rp.750 Miliar sd. Rp.1 Triliun	OP	2,640,000.00
	r. Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya di atas Rp.1 Triliun	OP	2,970,000.00
	1.2.3. Honorarium Pengguna Anggaran		
	1.2.3.1. Honorarium Pengguna Anggaran Pengadaan Barang/Jasa (Konstruksi)		
	a. Nilai pagu pengadaan di atas Rp.100 Miliar sd. Rp.250 Miliar	OP	3,580,000
	b. Nilai pagu pengadaan di atas Rp.250 Miliar sd. Rp.500 Miliar	OP	4,030,000
	c. Nilai pagu pengadaan di atas Rp.500 Miliar sd. Rp.750 Miliar	OP	4,490,000
	e. Nilai pagu pengadaan di atas Rp.750 Miliar sd. Rp.1 Triliun	OP	4,940,000
	f. Nilai pagu pengadaan di atas Rp.1 Triliun	OP	5,560,000

	1.2.3.2. Honorarium Pengguna Anggaran Pengadaan Barang (Non Konstruksi)		
	a. Nilai pagu pengadaan di atas Rp.100 Miliar sd. Rp.250 Miliar	OP	3,230,000
	b. Nilai pagu pengadaan di atas Rp.250 Miliar sd. Rp.500 Miliar	OP	3,640,000
	c. Nilai pagu pengadaan di atas Rp.500 Miliar sd. Rp.750 Miliar	OP	4,040,000
	d. Nilai pagu pengadaan di atas Rp.750 Miliar sd. Rp.1 Triliun	OP	4,450,000
	e. Nilai pagu pengadaan di atas Rp.1 Triliun	OP	5,010,000
	1.2.3.3. Honorarium Pengguna Anggaran Pengadaan Jasa (Non Konstruksi)		
	a. Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi/jasa lainnya di atas Rp.10 Miliar sd. Rp.25 Miliar	OP	1,510,000
	b. Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi/jasa lainnya di atas Rp.25 Miliar sd. Rp.50 Miliar	OP	1,750,000
	c. Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi/jasa lainnya di atas Rp.50 Miliar sd. Rp.75 Miliar	OP	1,990,000
	d. Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi/jasa lainnya di atas Rp.75 Miliar sd. Rp.100 Miliar	OP	2,230,000
	e. Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi/jasa lainnya di atas Rp.100 Miliar sd. Rp.250 Miliar	OP	2,560,000
	f. Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi/jasa lainnya di atas Rp.250 Miliar sd. Rp.500 Miliar	OP	2,880,000
	g. Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi/jasa lainnya di atas Rp.500 Miliar sd. Rp.750 Miliar	OP	3,200,000
	h. Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi/jasa lainnya di atas Rp.750 Miliar sd. Rp.1 Triliun	OP	3,520,000
	i. Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi/jasa lainnya di atas Rp.1 Triliun	OP	3,960,000
1.3.	HONORARIUM PERANGKAT UNIT KERJA PENGADAAN BARANG DAN JASA (UKPBJ)		
	1.3.1. Kepala	OB	1,000,000
	1.3.2. Sekretaris/Staf Pendukung	OB	750,000
1.4.	HONORARIUM NARASUMBER / PEMBAHAS / MODERATOR / PEMBAWA ACARA / PANITIA		
	1.4.1. Honorarium Narasumber / Pembahas		
	a. Menteri / Pejabat Setingkat Menteri / Pejabat Negara Lainnya	OJ	1,700,000
	b. Kepala Daerah / Pejabat setingkat Kepala Daerah / Pejabat daerah lainnya yang disetarakan	OJ	1,400,000
	c. Pejabat Eselon I / yang disetarakan	OJ	1,200,000
	d. Pejabat Eselon II / yang disetarakan	OJ	1,000,000
	e. Pejabat Eselon III ke bawah / yang disetarakan	OJ	900,000
	1.4.2. Honorarium Moderator		
	Moderator	OK	700,000.00
	1.4.3. Honorarium Pembawa Acara		
	Pembawa Acara	OK	400,000
	1.4.4. Honorarium Panitia		
	a. Penanggung Jawab	OK	450,000
	b. Ketua / Wakil Ketua	OK	400,000
	c. Sekretaris	OK	300,000
	d. Anggota	OK	300,000
1.5.	HONORARIUM TIM PELAKSANA KEGIATAN DAN SEKRETARIAT TIM PELAKSANA KEGIATAN		
	1.5.1. Honorarium Tim Pelaksa Kegiatan		
	1.5.1.1. Yang ditetapkan Oleh Kepala Daerah		
	a. Pengarah	OB	1,500,000
	b. Penanggung Jawab	OB	1,250,000
	c. Ketua	OB	1,000,000
	d. Wakil Ketua	OB	850,000
	e. Sekretaris	OB	750,000
	f. Anggota	OB	750,000
	1.5.1.2. Yang ditetapkan Oleh Sekretaris Daerah		
	a. Pengarah	OB	750,000
	b. Penanggung Jawab	OB	700,000

	c. Ketua	OB	650,000
	d. Wakil Ketua	OB	600,000
	e. Sekretaris	OB	500,000
	f. Anggota	OB	500,000
	1.5.2. Honorarium Sekretariat Tim Pelaksa Kegiatan		
	1.5.2.1. Yang ditetapkan Oleh Kepala Daerah/Sekretaris Daerah		
	a. Ketua / Wakil Ketua	OB	250,000
	b. b. Anggota	OB	220,000
1.6	HONORARIUM PEMBERI KETERANGAN AHLI / SAKSI AHLI DAN BERACARA		
	a. Honorarium Pemberi Keterangan Ahli / Saksi Ahli	OK	1,800,000
	b. Honorarium Beracara	OK	1,800,000
1.7.	HONORARIUM PENYULUH NON PEGAWAI NEGERI SIPIL		
	a. SLTA	OB	2,100,000
	b. DI / DII / D III / Sarjana Terapan	OB	2,400,000
	c. SARJANA (S1)	OB	2,600,000
	d. MASTER (S2)	OB	2,800,000
	e. DOKTOR (S 3)	OB	3,000,000
1.8.	HONORARIUM ROHANIWAN	OK	250,000
1.9.	HONORARIUM TIM PENYUSUN JURNAL/BULETIN/MAJALAH/PENGELOLA TEKNOLOGI INFORMASI/ PENGELOLA WEBSITE		
	1.9.1. Honorarium Tim Penyusun Jurnal		
	a. Penanggung Jawab	Oter	500,000
	b. Redaktur	Oter	400,000
	c. Penyunting/Editor	Oter	300,000
	d. Desain Grafis	Oter	180,000
	e. Fotografer	Oter	180,000
	f. Sekretariat	Oter	150,000
	g, Pembuat Artikel	Per Halaman	200,000
	1.9.2. Honorarium Tim Penyusun Buletin/Majalah		
	a. Penanggung Jawab	Oter	400,000
	b. Redaktur	Oter	300,000
	c. Penyunting/Editor	Oter	250,000
	d. Desain Grafis	Oter	180,000
	e. Fotografer	Oter	180,000
	f. Sekretariat	Oter	150,000
	g, Pembuat Artikel	Per Halaman	100,000
	1.9.3. Honorarium Tim Pengelola Teknologi Informasi/Pengelolaan Website		
	a. Penanggung Jawab	OB	500,000
	b. Redaktur	OB	450,000
	c. Editor	OB	400,000
	d. Web Admin	OB	350,000
	e. Web Developer	OB	300,000
	f. Pembuat Artikel	Per Halaman	100,000
	g, Pembuat Artikel		
1.10.	HONORARIUM PENYELENGGARAAN UJIAN		
	1.10.1. Honorarium Penyelenggaraan Ujian Tingkat Pendidikan Dasar		
	a. Penyusun atau Pembuat Bahan Ujian	Naskah/ Pelajaran	150,000
	b. Pengawas Ujian	OH	240,000
	c. Pemeriksa Hasil Ujian	Siswa/Mata ujian	5,000
	1.10.2. Honorarium Penyelenggaraan Ujian Tingkat Pendidikan Menengah		
	a. Penyusun atau Pembuat Bahan Ujian	Naskah/ Pelajaran	190,000

	b. Pengawas Ujian	OH	270,000
	c. Pemeriksa Hasil Ujian	Siswa/Mata ujian	7,500
1.11.	HONORARIUM PENULIS BUTIR SOAL TINGKAT PROVINSI/KOTA		
	1.11.1. Honorarium Penyusun/Penulis Butir Soal Tingkat Provinsi/Kota	Per Butir Soal	100,000
	1.11.2. Honorarium Telaah Butir Soal Tingkat Provinsi/Kota		
	a. Telaah Materi Soal	Per Butir Soal	45,000
	b. Telaah Bahas Soal	Per Butir Soal	20,000
1.12.	HONORARIUM PENYELENGGARAAN KEGIATAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN (DIKLAT)		
	1.12.1. Honorarium Penceramah	OJP	1,000,000
	1.12.2. Honorarium Pengajar yang berasal dari luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara	OJP	300,000
	1.12.3. Honorarium Pengajar yang berasal dari dalam satuan kerja perangkat daerah penyelenggara	OJP	200,000
	1.12.4. Honorarium penyusunan Modul diklat	Per Modul	5,000,000
	1.12.5. Honorarium Panitia Penyelenggara kegiatan Diklat		
	a. Lama diklat s.d 5 hari		
	1) Penanggung Jawab	OK	450,000
	2) Ketua / Wakil Ketua	OK	400,000
	3) Sekretaris	OK	300,000
	4) Anggota	OK	300,000
	b. Lama diklat 6 s.d 30 hari :		
	1) Penanggung Jawab	OK	675,000
	2) Ketua / Wakil Ketua	OK	600,000
	3) Sekretaris	OK	450,000
	4) Anggota	OK	450,000
	c. Lama diklat lebih dari 30 hari :		
	1) Penanggung Jawab	OK	900,000
	2) Ketua / Wakil Ketua	OK	800,000
	3) Sekretaris	OK	600,000
	4) Anggota	OK	600,000
1.13.	HONORARIUM TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH		
	1.13.1. Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah		
	a. Pembina	OB	3,500,000
	b. Pengarah	OB	3,000,000
	c. Ketua	OB	2,500,000
	d. Wakil Ketua	OB	2,000,000
	e. Sekretaris	OB	1,500,000
	f. Anggota		
	1) Anggota tim perumus	OB	1,300,000
	2) Anggota tim teknis penyusun	OB	1,200,000
	3) Anggota tim teknis pembahas	OB	1,100,000
	4) Anggota tim teknis pengumpul dan pengolah data	OB	1,000,000
	1.13.2. Honorarium Sekretariat Tim Anggaran Pemerintah Daerah		
	a. Ketua	OB	1,000,000
	b. Sekretaris	OB	900,000
	c. Anggota	OB	600,000

B. SATUAN BIAYA PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI

1.14.	UANG HARIAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI				
NO	PROVINSI	SATUAN	LUAR KOTA	DALAM KOTA LEBIH DARI 8 JAM	DIKLAT
1	Aceh	OH	360,000	140,000	110,000
2	Sumatera Utara	OH	370,000	150,000	110,000
3	Riau	OH	370,000	150,000	110,000

4	Kepulauan Riau	OH	370,000	150,000	110,000		
5	Jambi	OH	370,000	150,000	110,000		
6	Sumatera Barat	OH	380,000	150,000	110,000		
7	Sumatera Selatan	OH	380,000	150,000	110,000		
8	Lampung	OH	380,000	150,000	110,000		
9	Bengkulu	OH	380,000	150,000	110,000		
10	Bangka Belitung	OH	410,000	160,000	120,000		
11	Banten	OH	370,000	150,000	110,000		
12	Jawa Barat	OH	430,000	170,000	130,000		
13	DKI Jakarta	OH	530,000	210,000	160,000		
14	Jawa Tengah	OH	370,000	150,000	110,000		
15	DI Yogyakarta	OH	420,000	170,000	130,000		
16	Jawa Timur	OH	410,000	160,000	120,000		
17	Bali	OH	480,000	190,000	140,000		
18	Nusa Tenggara Barat	OH	440,000	180,000	130,000		
19	Nusa Tenggara Timur	OH	430,000	170,000	130,000		
20	Kalimantan Barat	OH	380,000	150,000	110,000		
21	Kalimantan Tengah	OH	360,000	140,000	110,000		
22	Kalimantan Selatan	OH	380,000	150,000	110,000		
23	Kalimantan Timur	OH	430,000	170,000	130,000		
24	Kalimantan Utara	OH	430,000	170,000	130,000		
25	Sulawesi Utara	OH	370,000	150,000	110,000		
26	Gorontalo	OH	370,000	150,000	110,000		
27	Sulawesi Barat	OH	410,000	160,000	120,000		
28	Sulawesi Selatan	OH	430,000	170,000	130,000		
29	Sulawesi Tengah	OH	370,000	150,000	110,000		
30	Sulawesi Tenggara	OH	380,000	150,000	110,000		
31	Maluku	OH	380,000	150,000	110,000		
32	Maluku Utara	OH	430,000	170,000	130,000		
33	Papua	OH	580,000	230,000	170,000		
34	Papua Barat	OH	480,000	190,000	140,000		
1.15.	UANG REPRESENTASI PERJALANAN DINAS						
NO	URAIAN		SATUAN	LUAR KOTA	DALAM KOTA LEBIH DARI 8 JAM		
1	Pejabat Negara, Pejabat Daerah		OH	250,000	125,000		
2	Pejabat Eselon I		OH	200,000	100,000		
3	Pejabat Eselon II		OH	150,000	75,000		
1.16.	SATUAN BIAYA PENGINAPAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI						
NO	PROVINSI	SATUAN	KEPALA DAERAH/ WAKIL KEPALA DAERAH/ PIMPINAN DPRD/ FORKOPIMDA	ANGGOTA DPRD/ PEJABAT ESELON II	PEJABAT ESELON III/ ASN GOLONGAN IV	PEJABAT ESELON IV/ ASN GOLONGAN III	ASN GOLONGAN I/II /Non PNS/PTT/ MASYARAKAT
1	Aceh	OH	4,420,000	3,526,000	1,294,000	556,000	556,000
2	Sumatera Utara	OH	4,960,000	1,518,000	1,100,000	530,000	530,000
3	Riau	OH	3,820,000	3,119,000	1,650,000	852,000	852,000
4	Kepulauan Riau	OH	4,275,000	1,854,000	1,037,000	792,000	792,000
5	Jambi	OH	4,000,000	3,337,000	1,212,000	580,000	580,000
6	Sumatera Barat	OH	5,236,000	3,332,000	1,353,000	650,000	650,000
7	Sumatera Selatan	OH	5,850,000	3,083,000	1,571,000	861,000	861,000
8	Lampung	OH	4,491,000	2,067,000	1,140,000	580,000	580,000
9	Bengkulu	OH	2,071,000	1,628,000	1,546,000	630,000	630,000
10	Bangka Belitung	OH	3,827,000	2,838,000	1,957,000	622,000	622,000
11	Banten	OH	5,725,000	2,373,000	1,000,000	718,000	718,000
12	Jawa Barat	OH	5,381,000	2,755,000	1,006,000	570,000	570,000
13	DKI Jakarta	OH	5,850,000	1,490,000	992,000	730,000	730,000
14	Jawa Tengah	OH	4,242,000	1,480,000	954,000	600,000	600,000

15	DI Yogyakarta	OH	5,017,000	2,695,000	1,384,000	845,000	845,000
16	Jawa Timur	OH	4,400,000	1,605,000	1,076,000	664,000	664,000
17	Bali	OH	4,890,000	1,946,000	990,000	910,000	910,000
18	Nusa Tenggara Barat	OH	3,500,000	2,648,000	1,418,000	580,000	580,000
19	Nusa Tenggara Timur	OH	3,000,000	1,493,000	1,355,000	550,000	550,000
20	Kalimantan Barat	OH	2,654,000	1,538,000	1,125,000	538,000	538,000
21	Kalimantan Tengah	OH	4,901,000	3,391,000	1,160,000	659,000	659,000
22	Kalimantan Selatan	OH	4,797,000	3,316,000	1,500,000	540,000	540,000
23	Kalimantan Timur	OH	4,000,000	2,188,000	1,507,000	804,000	804,000
24	Kalimantan Utara	OH	4,000,000	2,188,000	1,507,000	804,000	804,000
25	Sulawesi Utara	OH	4,919,000	2,290,000	924,000	782,000	782,000
26	Gorontalo	OH	4,168,000	2,549,000	1,431,000	764,000	764,000
27	Sulawesi Barat	OH	4,076,000	2,581,000	1,075,000	704,000	704,000
28	Sulawesi Selatan	OH	4,820,000	1,550,000	1,020,000	732,000	732,000
29	Sulawesi Tengah	OH	2,309,000	2,027,000	1,567,000	951,000	951,000
30	Sulawesi Tenggara	OH	2,475,000	2,059,000	1,297,000	786,000	786,000
31	Maluku	OH	3,467,000	3,240,000	1,048,000	667,000	667,000
32	Maluku Utara	OH	3,440,000	3,175,000	1,073,000	600,000	600,000
33	Papua	OH	3,859,000	3,318,000	2,521,000	829,000	829,000
34	Papua Barat	OH	3,872,000	3,212,000	2,056,000	718,000	718,000

C. SATUAN BIAYA PAKET KEGIATAN RAPAT /PERTEMUAN DIDALAM DAN DILUAR KANTOR

1.17	SATUAN BIAYA KEGIATAN RAPAT ATAU PERTEMUAN DI LUAR KANTOR SETINGKAT KEPALA DAERAH ATAU ESELON I					
NO	PROVINSI	SATUAN	HALFDAY	FULLDAY	FULLBOARD	RESIDENCE
1	Aceh	OP	346,000	403,000	1,075,000	749,000
2	Sumatera Utara	OP	276,000	365,000	800,000	641,000
3	Riau	OP	225,000	335,000	690,000	560,000
4	Kepulauan Riau	OP	230,000	360,000	790,000	590,000
5	Jambi	OP	271,000	364,000	1,008,000	635,000
6	Sumatera Barat	OP	245,000	310,000	987,000	555,000
7	Sumatera Selatan	OP	268,000	384,000	860,000	652,000
8	Lampung	OP	261,000	373,000	836,000	634,000
9	Bengkulu	OP	250,000	373,000	973,000	623,000
10	Bangka Belitung	OP	305,000	400,000	925,000	705,000
11	Banten	OP	395,000	468,000	919,000	863,000
12	Jawa Barat	OP	426,000	530,000	1,110,000	956,000
13	DKI Jakarta	OP	433,000	510,000	1,216,000	943,000
14	Jawa Tengah	OP	232,000	309,000	749,000	541,000
15	DI Yogyakarta	OP	250,000	405,000	963,000	655,000
16	Jawa Timur	OP	357,000	406,000	1,784,000	763,000
17	Bali	OP	375,000	490,000	1,500,000	865,000
18	Nusa Tenggara Barat	OP	368,000	530,000	1,001,000	898,000
19	Nusa Tenggara Timur	OP	308,000	388,000	1,088,000	696,000
20	Kalimantan Barat	OP	337,000	400,000	810,000	737,000
21	Kalimantan Tengah	OP	317,000	487,000	1,267,000	804,000
22	Kalimantan Selatan	OP	264,000	360,000	930,000	624,000
23	Kalimantan Timur	OP	274,000	365,000	863,000	639,000
24	Kalimantan Utara	OP	274,000	350,000	848,000	624,000
25	Sulawesi Utara	OP	273,000	350,000	870,000	623,000
26	Gorontalo	OP	215,000	393,000	1,338,000	608,000
27	Sulawesi Barat	OP	264,000	382,000	856,000	646,000
28	Sulawesi Selatan	OP	290,000	410,000	1,574,000	700,000
29	Sulawesi Tengah	OP	283,000	389,000	1,013,000	672,000
30	Sulawesi Tenggara	OP	237,000	350,000	800,000	587,000
31	Maluku	OP	306,000	454,000	1,300,000	760,000
32	Maluku Utara	OP	316,000	498,000	850,000	814,000

33	Papua	OP	318,000	536,000	1,863,000	854,000
34	Papua Barat	OP	292,000	526,000	1,752,000	818,000
1.18	SATUAN BIAYA KEGIATAN RAPAT ATAU PERTEMUAN DI LUAR KANTOR SETINGKAT ESELON II					
NO	PROVINSI	SATUAN	HALFDAY	FULLDAY	FULLBOARD	RESIDENCE
1	Aceh	OP	300,000	330,000	772,000	630,000
2	Sumatera Utara	OP	178,000	275,000	746,000	453,000
3	Riau	OP	185,000	245,000	591,000	430,000
4	Kepulauan Riau	OP	227,000	273,000	625,000	500,000
5	Jambi	OP	215,000	301,000	840,000	516,000
6	Sumatera Barat	OP	173,000	240,000	663,000	413,000
7	Sumatera Selatan	OP	218,000	293,000	745,000	511,000
8	Lampung	OP	216,000	270,000	640,000	486,000
9	Bengkulu	OP	214,000	284,000	912,000	498,000
10	Bangka Belitung	OP	299,000	385,000	804,000	684,000
11	Banten	OP	275,000	354,000	837,000	629,000
12	Jawa Barat	OP	331,000	398,000	822,000	729,000
13	DKI Jakarta	OP	354,000	433,000	1,197,000	787,000
14	Jawa Tengah	OP	191,000	263,000	675,000	454,000
15	DI Yogyakarta	OP	210,000	310,000	750,000	520,000
16	Jawa Timur	OP	338,000	395,000	1,352,000	733,000
17	Bali	OP	330,000	441,000	1,182,000	771,000
18	Nusa Tenggara Barat	OP	280,000	420,000	764,000	700,000
19	Nusa Tenggara Timur	OP	271,000	377,000	825,000	648,000
20	Kalimantan Barat	OP	250,000	331,000	664,000	581,000
21	Kalimantan Tengah	OP	242,000	340,000	1,031,000	582,000
22	Kalimantan Selatan	OP	194,000	295,000	734,000	489,000
23	Kalimantan Timur	OP	207,000	302,000	750,000	509,000
24	Kalimantan Utara	OP	207,000	302,000	750,000	509,000
25	Sulawesi Utara	OP	185,000	270,000	737,000	455,000
26	Gorontalo	OP	175,000	250,000	1,299,000	425,000
27	Sulawesi Barat	OP	235,000	323,000	792,000	558,000
28	Sulawesi Selatan	OP	206,000	320,000	1,127,000	526,000
29	Sulawesi Tengah	OP	234,000	385,000	738,000	619,000
30	Sulawesi Tenggara	OP	195,000	295,000	688,000	490,000
31	Maluku	OP	253,000	346,000	724,000	599,000
32	Maluku Utara	OP	169,000	354,000	669,000	523,000
33	Papua	OP	293,000	478,000	990,000	771,000
34	Papua Barat	OP	284,000	421,000	1,120,000	705,000
1.19.	UANG HARIAN KEGIATAN RAPAT ATAU PERTEMUAN LUAR KANTOR					
NO	PROVINSI	SATUAN	FULLBOARD DI LUAR KOTA	FULLBOARD DI DALAM KOTA	FULLDAY/ HALFDAY DIDALAM KOTA	RESIDENCE DI DALAM KOTA
1	Aceh	OH	120,000	120,000	85,000	120,000
2	Sumatera Utara	OH	130,000	130,000	95,000	130,000
3	Riau	OH	130,000	130,000	85,000	130,000
4	Kepulauan Riau	OH	130,000	130,000	95,000	130,000
5	Jambi	OH	130,000	130,000	95,000	130,000
6	Sumatera Barat	OH	120,000	120,000	85,000	120,000
7	Sumatera Selatan	OH	120,000	120,000	85,000	120,000
8	Lampung	OH	130,000	130,000	95,000	130,000
9	Bengkulu	OH	130,000	130,000	95,000	130,000
10	Bangka Belitung	OH	130,000	130,000	95,000	130,000
11	Banten	OH	120,000	120,000	85,000	120,000
12	Jawa Barat	OH	150,000	150,000	105,000	150,000
13	DKI Jakarta	OH	180,000	180,000	130,000	180,000
14	Jawa Tengah	OH	130,000	130,000	95,000	130,000

15	DI Yogyakarta	OH	140,000	140,000	100,000	140,000
16	Jawa Timur	OH	140,000	140,000	100,000	140,000
17	Bali	OH	160,000	160,000	115,000	160,000
18	Nusa Tenggara Barat	OH	150,000	150,000	105,000	150,000
19	Nusa Tenggara Timur	OH	140,000	140,000	100,000	140,000
20	Kalimantan Barat	OH	130,000	130,000	95,000	130,000
21	Kalimantan Tengah	OH	120,000	120,000	85,000	120,000
22	Kalimantan Selatan	OH	130,000	130,000	95,000	130,000
23	Kalimantan Timur	OH	150,000	150,000	105,000	150,000
24	Kalimantan Utara	OH	150,000	150,000	105,000	150,000
25	Sulawesi Utara	OH	130,000	130,000	95,000	130,000
26	Gorontalo	OH	130,000	130,000	95,000	130,000
27	Sulawesi Barat	OH	120,000	120,000	85,000	120,000
28	Sulawesi Selatan	OH	150,000	150,000	105,000	150,000
29	Sulawesi Tengah	OH	130,000	130,000	95,000	130,000
30	Sulawesi Tenggara	OH	130,000	130,000	95,000	130,000
31	Maluku	OH	120,000	120,000	85,000	120,000
32	Maluku Utara	OH	130,000	130,000	95,000	130,000
33	Papua	OH	200,000	200,000	140,000	200,000
34	Papua Barat	OH	160,000	160,000	115,000	160,000

D. SATUAN BIAYA PENGADAAN KENDARAAN DINAS

1.20.	KENDARAAN DINAS PEJABAT				
NO	URAIAN			SATUAN	BESARAN
1	Pengadaan Kendaraan Dinas Pejabat			UNIT	482,074,000
1.21.	KENDARAAN OPERASIONAL KANTOR DAN / ATAU LAPANGAN RODA 4 (EMPAT)				
NO	URAIAN		SATUAN	PICK UP	MINIBUS DOUBLE GARDAN
1	Pengadaan Kendaraan Kendaraan Operasional kantor dan/atau lapangan roda 4 (empat)		UNIT	219,606,000	335,431,000 479,479,000
1.22.	KENDARAAN OPERASIONAL BUS				
NO	URAIAN			SATUAN	BESARAN
1	Roda 4 dan/ atau Bus Kecil			UNIT	360,942,000
2	Roda 6 dan/ atau Bus Sedang			UNIT	718,252,000
3	Roda 6 dan/ atau Bus Besar			UNIT	1,184,787,000
1.23.	KENDARAAN OPERASIONAL KANTOR DAN / ATAU LAPANGAN RODA 2 (DUA)				
NO	URAIAN			SATUAN	BESARAN
1	Kendaraan Operasional Kantor			UNIT	25,000,000
2	Kendaraan Operasional Lapangan			UNIT	35,600,000

WALIKOTA BUKITTINGGI

dto

ERMAN SAFAR

LAMPIRAN II
PERATURAN WALIKOTA BUKITTINGGI
NOMOR 18 TAHUN 2022
TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN WALIKOTA
BUKITTINGGI NOMOR 51 TAHUN 2020 TENTANG
STANDAR HARGA SATUAN PEMERINTAH KOTA BUKITTINGGI

STANDAR HARGA SATUAN PEMERINTAH KOTA BUKITTINGGI
YANG BERFUNGSI SEBAGAI BATAS TERTINGGI DALAM PERENCANAAN DAN ESTIMASI DALAM PELAKSANAAN APBD

A. SATUAN BIAYA HONORARIUM NARASUMBER, MODERATOR, ATAU PEMBAWA ACARA PROFESIONAL

2.1. HONORARIUM NARASUMBER, MODERATOR, ATAU PEMBAWA ACARA PROFESIONAL

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN
	2.1.1 Honorarium Narasumber	OJ	1,700,000
	2.1.2 Honorarium Moderator	OK	1,000,000
	2.1.3 Honorarium Pembawa Acara	OK	750,000

B. SATUAN BIAYA PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI

2.2. SATUAN BIAYA TIKET PESAWAT PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI PERGI PULANG (PP)

NO	KOTA		SATUAN BIAYA TIKET	
	ASAL	TUJUAN	BISNIS	EKONOMI
1	2	3	4	5
1	JAKARTA	AMBON	13,285,000.00	7,081,000.00
2	JAKARTA	BALIK PAPAN	7,412,000.00	3,797,000.00
3	JAKARTA	BANDA ACEH	7,519,000.00	4,492,000.00
4	JAKARTA	BANDAR LAMPUNG	2,407,000.00	1,583,000.00
5	JAKARTA	BANJAR MASIN	5,252,000.00	2,995,000.00
6	JAKARTA	BATAM	4,867,000.00	2,888,000.00
7	JAKARTA	BENGKULU	4,364,000.00	2,621,000.00
8	JAKARTA	BIAK	14,065,000.00	7,519,000.00
9	JAKARTA	DENPASAR	5,305,000.00	3,262,000.00
10	JAKARTA	GORONTALO	7,231,000.00	4,824,000.00
11	JAKARTA	JAMBI	4,065,000.00	2,460,000.00
12	JAKARTA	JAYAPURA	14,568,000.00	8,193,000.00
13	JAKARTA	YOGYAKARTA	4,107,000.00	2,268,000.00
14	JAKARTA	KENDARI	7,658,000.00	4,182,000.00
15	JAKARTA	KUPANG	9,413,000.00	5,081,000.00
16	JAKARTA	MAKASAR	7,444,000.00	3,829,000.00
17	JAKARTA	MALANG	4,599,000.00	2,695,000.00
18	JAKARTA	MAMUJU	7,295,000.00	4,867,000.00
19	JAKARTA	MANADO	10,824,000.00	5,102,000.00
20	JAKARTA	MANOKWARI	16,226,000.00	10,824,000.00
21	JAKARTA	MATARAM	5,316,000.00	3,230,000.00
22	JAKARTA	MEDAN	7,252,000.00	3,808,000.00
23	JAKARTA	PADANG	5,530,000.00	2,952,000.00
24	JAKARTA	PALANGKARAYA	4,984,000.00	2,984,000.00
25	JAKARTA	PALEMBANG	3,861,000.00	2,268,000.00
26	JAKARTA	PALU	9,348,000.00	5,113,000.00
27	JAKARTA	PANGKAL PINANG	3,412,000.00	2,139,000.00
28	JAKARTA	PEKANBARU	5,583,000.00	3,016,000.00
29	JAKARTA	PONTIANAK	4,353,000.00	2,781,000.00
30	JAKARTA	SEMARANG	3,861,000.00	2,182,000.00
31	JAKARTA	SOLO	3,861,000.00	2,342,000.00
32	JAKARTA	SURABAYA	5,466,000.00	2,674,000.00
33	JAKARTA	TERNATE	10,001,000.00	6,664,000.00
34	JAKARTA	TIMIKA	13,830,000.00	7,487,000.00
35	AMBON	DENPASAR	8,054,000.00	4,471,000.00
36	AMBON	JAYAPURA	7,434,000.00	4,161,000.00
37	AMBON	KENDARI	4,824,000.00	2,856,000.00
38	AMBON	MAKASAR	6,022,000.00	3,455,000.00
39	AMBON	MANOKWARI	5,177,000.00	3,027,000.00
40	AMBON	PALU	6,140,000.00	3,508,000.00
41	AMBON	SORONG	3,637,000.00	2,257,000.00
42	AMBON	SURABAYA	8,803,000.00	4,845,000.00
43	AMBON	TERNATE	4,022,000.00	2,449,000.00
44	BALIK PAPAN	BANDA ACEH	12,739,000.00	6,749,000.00
45	BALIK PAPAN	BATAM	10,354,000.00	5,305,000.00
46	BALIK PAPAN	DENPASAR	10,739,000.00	5,648,000.00

47	BALIK PAPAN	JAYAPURA	19,071,000.00	10,086,000.00
48	BALIK PAPAN	YOGYAKARTA	9,669,000.00	4,749,000.00
49	BALIK PAPAN	MAKASAR	12,664,000.00	6,150,000.00
50	BALIK PAPAN	MANADO	15,702,000.00	7,295,000.00
51	BALIK PAPAN	MEDAN	12,493,000.00	6,140,000.00
52	BALIK PAPAN	PADANG	10,942,000.00	5,369,000.00
53	BALIK PAPAN	PALEMBANG	9,445,000.00	4,749,000.00
54	BALIK PAPAN	PEKANBARU	10,996,000.00	5,423,000.00
55	BALIK PAPAN	SEMARANG	9,445,000.00	4,674,000.00
56	BALIK PAPAN	SOLO	9,445,000.00	4,813,000.00
57	BALIK PAPAN	SURABAYA	10,889,000.00	5,113,000.00
58	BALIK PAPAN	TIMIKA	18,408,000.00	9,445,000.00
59	BANDA ACEH	DENPASAR	10,835,000.00	6,279,000.00
60	BANDA ACEH	JAYAPURA	19,167,000.00	10,717,000.00
61	BANDA ACEH	YOGYAKARTA	9,765,000.00	5,380,000.00
62	BANDA ACEH	MAKASAR	12,760,000.00	6,781,000.00
63	BANDA ACEH	MANADO	15,798,000.00	7,926,000.00
64	BANDA ACEH	PONTIANAK	9,990,000.00	5,840,000.00
65	BANDA ACEH	SEMARANG	9,530,000.00	5,305,000.00
66	BANDA ACEH	SOLO	9,530,000.00	5,444,000.00
67	BANDA ACEH	SURABAYA	10,985,000.00	5,744,000.00
68	BANDA ACEH	TIMIKA	18,504,000.00	10,076,000.00
69	BANDAR LAMPUNG	BALIK PAPAN	8,129,000.00	4,129,000.00
70	BANDAR LAMPUNG	BANDA ACEH	8,225,000.00	4,760,000.00
71	BANDAR LAMPUNG	BANJAR MASIN	6,193,000.00	3,412,000.00
72	BANDAR LAMPUNG	BATAM	5,840,000.00	3,316,000.00
73	BANDAR LAMPUNG	BIAK	14,119,000.00	7,487,000.00
74	BANDAR LAMPUNG	DENPASAR	6,236,000.00	3,647,000.00
75	BANDAR LAMPUNG	JAYAPURA	14,568,000.00	8,097,000.00
76	BANDAR LAMPUNG	YOGYAKARTA	5,155,000.00	2,760,000.00
77	BANDAR LAMPUNG	KENDARI	8,354,000.00	4,482,000.00
78	BANDAR LAMPUNG	MAKASAR	8,161,000.00	4,161,000.00
79	BANDAR LAMPUNG	MALANG	5,594,000.00	3,134,000.00
80	BANDAR LAMPUNG	MANADO	11,199,000.00	5,305,000.00
81	BANDAR LAMPUNG	MATARAM	6,246,000.00	3,626,000.00
82	BANDAR LAMPUNG	MEDAN	7,979,000.00	4,150,000.00
83	BANDAR LAMPUNG	PADANG	6,439,000.00	3,380,000.00
84	BANDAR LAMPUNG	PALANGKARAYA	5,947,000.00	3,401,000.00
85	BANDAR LAMPUNG	PALEMBANG	4,931,000.00	2,760,000.00
86	BANDAR LAMPUNG	PEKANBARU	6,482,000.00	3,433,000.00
87	BANDAR LAMPUNG	PONTIANAK	5,380,000.00	3,220,000.00
88	BANDAR LAMPUNG	SEMARANG	4,931,000.00	2,685,000.00
89	BANDAR LAMPUNG	SOLO	4,931,000.00	2,824,000.00
90	BANDAR LAMPUNG	SURABAYA	6,386,000.00	3,123,000.00
91	BANDAR LAMPUNG	TIMIKA	13,905,000.00	7,455,000.00
92	BANDUNG	BATAM	6,289,000.00	3,583,000.00
93	BANDUNG	DENPASAR	5,626,000.00	3,252,000.00
94	BANDUNG	JAKARTA	2,064,000.00	1,476,000.00
95	BANDUNG	JAMBI	5,006,000.00	2,941,000.00
96	BANDUNG	YOGYAKARTA	3,369,000.00	2,129,000.00
97	BANDUNG	PADANG	6,129,000.00	3,508,000.00
98	BANDUNG	PALEMBANG	4,385,000.00	2,631,000.00
99	BANDUNG	PANGKAL PINANG	4,599,000.00	2,738,000.00
100	BANDUNG	PEKANBARU	6,525,000.00	3,701,000.00
101	BANDUNG	SEMARANG	3,027,000.00	1,957,000.00
102	BANDUNG	SOLO	3,647,000.00	2,268,000.00
103	BANDUNG	SURABAYA	4,824,000.00	2,856,000.00
104	BANDUNG	TANJUNG PANDAN	4,439,000.00	2,663,000.00
105	BANJARMASIN	BANDA ACEH	10,792,000.00	6,022,000.00
106	BANJARMASIN	BATAM	8,407,000.00	4,578,000.00
107	BANJARMASIN	BIAK	16,686,000.00	8,749,000.00
108	BANJARMASIN	DENPASAR	8,792,000.00	4,920,000.00
109	BANJARMASIN	JAYAPURA	17,135,000.00	9,359,000.00
110	BANJARMASIN	YOGYAKARTA	7,723,000.00	4,022,000.00
111	BANJARMASIN	MEDAN	10,546,000.00	5,412,000.00

112	BANJARMASIN	PADANG	9,006,000.00	4,642,000.00
113	BANJARMASIN	PALEMBANG	7,498,000.00	4,022,000.00
114	BANJARMASIN	PEKANBARU	9,049,000.00	4,696,000.00
115	BANJARMASIN	SEMARANG	7,498,000.00	3,958,000.00
116	BANJARMASIN	SOLO	7,498,000.00	4,097,000.00
117	BANJARMASIN	SURABAYA	8,942,000.00	4,385,000.00
118	BANJARMASIN	TIMIKA	16,472,000.00	8,717,000.00
119	BATAM	BANDA ACEH	10,439,000.00	5,936,000.00
120	BATAM	DENPASAR	8,450,000.00	4,824,000.00
121	BATAM	JAYAPURA	16,782,000.00	9,263,000.00
122	BATAM	YOGYAKARTA	7,370,000.00	3,936,000.00
123	BATAM	MAKASSAR	10,375,000.00	5,337,000.00
124	BATAM	MANADO	13,413,000.00	6,482,000.00
125	BATAM	MEDAN	10,193,000.00	5,316,000.00
126	BATAM	PADANG	8,653,000.00	4,546,000.00
127	BATAM	PALEMBANG	7,145,000.00	3,936,000.00
128	BATAM	PEKANBARU	8,707,000.00	4,599,000.00
129	BATAM	PONTIANAK	7,594,000.00	4,396,000.00
130	BATAM	SEMARANG	7,145,000.00	3,861,000.00
131	BATAM	SOLO	7,145,000.00	4,000,000.00
132	BATAM	SURABAYA	8,600,000.00	4,300,000.00
133	BATAM	TIMIKA	16,119,000.00	8,621,000.00
134	BENGKULU	PALEMBANG	2,899,000.00	1,893,000.00
135	BIAK	BALIK PAPAN	18,622,000.00	9,477,000.00
136	BIAK	BANDA ACEH	18,718,000.00	10,108,000.00
137	BIAK	BATAM	16,333,000.00	8,664,000.00
138	BIAK	DENPASAR	16,729,000.00	8,995,000.00
139	BIAK	JAYAPURA	3,615,000.00	2,321,000.00
140	BIAK	YOGYAKARTA	15,648,000.00	8,108,000.00
141	BIAK	MANADO	11,734,000.00	6,353,000.00
142	BIAK	MEDAN	18,472,000.00	9,498,000.00
143	BIAK	PADANG	16,932,000.00	8,728,000.00
144	BIAK	PALEMBANG	15,424,000.00	8,108,000.00
145	BIAK	PEKANBARU	16,985,000.00	8,781,000.00
146	BIAK	PONTIANAK	15,873,000.00	8,568,000.00
147	BIAK	SURABAYA	12,782,000.00	7,081,000.00
148	BIAK	TIMIKA	5,808,000.00	3,444,000.00
149	DENPASAR	JAYAPURA	11,680,000.00	6,845,000.00
150	DENPASAR	KUPANG	5,091,000.00	2,952,000.00
151	DENPASAR	MAKASAR	4,182,000.00	2,631,000.00
152	DENPASAR	MANADO	7,851,000.00	4,278,000.00
153	DENPASAR	MATARAM	1,840,000.00	1,390,000.00
154	DENPASAR	MEDAN	10,589,000.00	5,658,000.00
155	DENPASAR	PADANG	9,049,000.00	4,888,000.00
156	DENPASAR	PALANGKARAYA	8,557,000.00	4,909,000.00
157	DENPASAR	PALEMBANG	7,541,000.00	4,278,000.00
158	DENPASAR	PEKANBARU	9,092,000.00	4,942,000.00
159	DENPASAR	PONTIANAK	7,990,000.00	4,738,000.00
160	DENPASAR	TIMIKA	10,140,000.00	6,129,000.00
161	JAMBI	BALIK PAPAN	7,733,000.00	4,407,000.00
162	JAMBI	BANJAR MASIN	7,690,000.00	4,193,000.00
163	JAMBI	DENPASAR	7,733,000.00	4,439,000.00
164	JAMBI	YOGYAKARTA	6,653,000.00	3,551,000.00
165	JAMBI	KUPANG	11,434,000.00	6,075,000.00
166	JAMBI	MAKASSAR	9,659,000.00	4,952,000.00
167	JAMBI	MALANG	7,091,000.00	3,925,000.00
168	JAMBI	MANADO	12,707,000.00	6,097,000.00
169	JAMBI	PALANGKARAYA	7,444,000.00	4,193,000.00
170	JAMBI	PONTIANAK	6,878,000.00	4,011,000.00
171	JAMBI	SEMARANG	6,428,000.00	3,476,000.00
172	JAMBI	SOLO	6,428,000.00	3,615,000.00
173	JAMBI	SURABAYA	7,883,000.00	3,915,000.00
174	JAYAPURA	YOGYAKARTA	13,274,000.00	7,690,000.00
175	JAYAPURA	MANADO	22,109,000.00	11,263,000.00
176	JAYAPURA	MEDAN	18,932,000.00	10,097,000.00

177	JAYAPURA	PADANG	17,381,000.00	9,327,000.00
178	JAYAPURA	PALEMBANG	15,873,000.00	8,717,000.00
179	JAYAPURA	PEKANBARU	17,435,000.00	9,380,000.00
180	JAYAPURA	PONTIANAK	16,322,000.00	9,177,000.00
181	JAYAPURA	TIMIKA	3,615,000.00	2,289,000.00
182	YOGYAKARTA	DENPASAR	3,861,000.00	2,481,000.00
183	YOGYAKARTA	MAKASSAR	6,525,000.00	3,893,000.00
184	YOGYAKARTA	MANADO	10,536,000.00	5,722,000.00
185	YOGYAKARTA	MEDAN	9,519,000.00	4,770,000.00
186	YOGYAKARTA	PADANG	7,969,000.00	4,000,000.00
187	YOGYAKARTA	PALEMBANG	6,460,000.00	3,380,000.00
188	YOGYAKARTA	PEKANBARU	8,022,000.00	4,054,000.00
189	YOGYAKARTA	PONTIANAK	6,910,000.00	3,840,000.00
190	YOGYAKARTA	TIMIKA	11,894,000.00	7,038,000.00
191	KENDARI	BANDA ACEH	12,953,000.00	7,102,000.00
192	KENDARI	BATAM	10,568,000.00	5,658,000.00
193	KENDARI	DENPASAR	5,455,000.00	3,273,000.00
194	KENDARI	YOGYAKARTA	8,129,000.00	4,706,000.00
195	KENDARI	PADANG	11,167,000.00	5,722,000.00
196	KENDARI	PALEMBANG	9,659,000.00	5,102,000.00
197	KENDARI	PEKANBARU	11,220,000.00	5,776,000.00
198	KENDARI	SEMARANG	9,659,000.00	5,027,000.00
199	KENDARI	SOLO	9,659,000.00	5,166,000.00
200	KENDARI	SURABAYA	11,103,000.00	5,466,000.00
201	KENDARI	TIMIKA	18,633,000.00	9,798,000.00
202	KUPANG	JAYAPURA	14,386,000.00	8,108,000.00
203	KUPANG	YOGYAKARTA	7,348,000.00	4,182,000.00
204	KUPANG	MAKASAR	7,637,000.00	4,311,000.00
205	KUPANG	MANADO	11,648,000.00	6,140,000.00
206	KUPANG	SURABAYA	6,749,000.00	3,722,000.00
207	MAKASSAR	BIAK	8,493,000.00	4,931,000.00
208	MAKASSAR	JAYAPURA	10,193,000.00	5,787,000.00
209	MAKASSAR	KENDARI	2,663,000.00	1,786,000.00
210	MAKASSAR	MANADO	5,327,000.00	2,909,000.00
211	MAKASSAR	TIMIKA	11,723,000.00	6,567,000.00
212	MALANG	BALIK PAPAN	10,108,000.00	5,134,000.00
213	MALANG	BANDA ACEH	10,204,000.00	5,765,000.00
214	MALANG	BANJAR MASIN	8,161,000.00	4,407,000.00
215	MALANG	BATAM	7,819,000.00	4,311,000.00
216	MALANG	BIAK	16,087,000.00	8,482,000.00
217	MALANG	JAYAPURA	16,536,000.00	9,092,000.00
218	MALANG	KENDARI	10,322,000.00	5,487,000.00
219	MALANG	MAKASAR	10,129,000.00	5,166,000.00
220	MALANG	MANADO	13,167,000.00	6,311,000.00
221	MALANG	MEDAN	9,958,000.00	5,145,000.00
222	MALANG	PADANG	8,418,000.00	4,385,000.00
223	MALANG	PALANGKARAYA	7,915,000.00	4,407,000.00
224	MALANG	PALEMBANG	6,899,000.00	3,765,000.00
225	MALANG	PEKANBARU	8,461,000.00	4,439,000.00
226	MALANG	TIMIKA	15,873,000.00	8,461,000.00
227	MANADO	MEDAN	15,552,000.00	7,316,000.00
228	MANADO	PADANG	14,012,000.00	6,546,000.00
229	MANADO	PALEMBANG	12,504,000.00	5,926,000.00
230	MANADO	PEKANBARU	14,055,000.00	6,599,000.00
231	MANADO	PONTIANAK	12,953,000.00	6,396,000.00
232	MANADO	SEMARANG	12,504,000.00	5,851,000.00
233	MANADO	SOLO	12,504,000.00	5,990,000.00
234	MANADO	SURABAYA	9,937,000.00	5,262,000.00
235	MANADO	TIMIKA	16,183,000.00	8,995,000.00
236	MATARAM	BALIK PAPAN	10,750,000.00	5,615,000.00
237	MATARAM	BANDA ACEH	10,846,000.00	6,246,000.00
238	MATARAM	BANJAR MASIN	8,803,000.00	4,888,000.00
239	MATARAM	BATAM	8,461,000.00	4,803,000.00
240	MATARAM	BIAK	11,552,000.00	6,546,000.00
241	MATARAM	JAYAPURA	13,092,000.00	7,327,000.00

242	MATARAM	YOGYAKARTA	4,417,000.00	2,781,000.00
243	MATARAM	MAKASAR	4,717,000.00	2,909,000.00
244	MATARAM	MANADO	8,717,000.00	4,738,000.00
245	MATARAM	MEDAN	10,600,000.00	5,637,000.00
246	MATARAM	PADANG	9,060,000.00	4,867,000.00
247	MATARAM	PALEMBANG	7,551,000.00	4,246,000.00
248	MATARAM	PEKANBARU	9,102,000.00	4,909,000.00
249	MATARAM	PONTIANAK	8,001,000.00	4,706,000.00
250	MATARAM	SURABAYA	3,829,000.00	2,321,000.00
251	MEDAN	BANDA ACEH	3,466,000.00	2,193,000.00
252	MEDAN	MAKASAR	12,514,000.00	6,172,000.00
253	MEDAN	PONTIANAK	9,733,000.00	5,230,000.00
254	MEDAN	SEMARANG	9,284,000.00	4,696,000.00
255	MEDAN	SOLO	9,284,000.00	4,835,000.00
256	MEDAN	SURABAYA	10,739,000.00	5,134,000.00
257	MEDAN	TIMIKA	18,258,000.00	9,455,000.00
258	PADANG	MAKASSAR	10,974,000.00	5,402,000.00
259	PADANG	PONTIANAK	8,193,000.00	4,460,000.00
260	PADANG	SEMARANG	7,744,000.00	3,925,000.00
261	PADANG	SOLO	7,744,000.00	4,065,000.00
262	PADANG	SURABAYA	9,199,000.00	4,364,000.00
263	PADANG	TIMIKA	16,718,000.00	8,685,000.00
264	PALANGKARAYA	BANDA ACEH	10,546,000.00	6,022,000.00
265	PALANGKARAYA	BATAM	8,161,000.00	4,578,000.00
266	PALANGKARAYA	YOGYAKARTA	7,477,000.00	4,022,000.00
267	PALANGKARAYA	MATARAM	8,557,000.00	4,888,000.00
268	PALANGKARAYA	MEDAN	10,300,000.00	5,412,000.00
269	PALANGKARAYA	PADANG	8,760,000.00	4,642,000.00
270	PALANGKARAYA	PALEMBANG	7,252,000.00	4,022,000.00
271	PALANGKARAYA	PEKANBARU	8,803,000.00	4,696,000.00
272	PALANGKARAYA	SEMARANG	7,252,000.00	3,947,000.00
273	PALANGKARAYA	SOLO	7,252,000.00	4,086,000.00
274	PALANGKARAYA	SURABAYA	8,696,000.00	4,385,000.00
275	PALEMBANG	BALIK PAPAN	9,894,000.00	5,220,000.00
276	PALEMBANG	MAKASAR	9,466,000.00	4,781,000.00
277	PALEMBANG	PONTIANAK	6,685,000.00	3,840,000.00
278	PALEMBANG	SEMARANG	6,236,000.00	3,305,000.00
279	PALEMBANG	SOLO	6,236,000.00	3,444,000.00
280	PALEMBANG	SURABAYA	7,690,000.00	3,744,000.00
281	PALEMBANG	TIMIKA	15,210,000.00	8,076,000.00
282	PALU	MAKASAR	4,268,000.00	2,578,000.00
283	PALU	POSO	1,957,000.00	1,423,000.00
284	PALU	SORONG	6,878,000.00	3,883,000.00
285	PALU	SURABAYA	6,878,000.00	3,883,000.00
286	PALU	TOLI-TOLI	2,941,000.00	1,915,000.00
287	PANGKAL PINANG	BALIK PAPAN	9,038,000.00	4,631,000.00
288	PANGKAL PINANG	BANJAR MASIN	7,091,000.00	3,915,000.00
289	PANGKAL PINANG	BATAM	6,739,000.00	3,818,000.00
290	PANGKAL PINANG	YOGYAKARTA	6,065,000.00	3,262,000.00
291	PANGKAL PINANG	MAKASAR	9,060,000.00	4,663,000.00
292	PANGKAL PINANG	MANADO	12,097,000.00	5,808,000.00
293	PANGKAL PINANG	MEDAN	8,888,000.00	4,653,000.00
294	PANGKAL PINANG	PADANG	7,337,000.00	3,883,000.00
295	PANGKAL PINANG	PALEMBANG	5,829,000.00	3,262,000.00
296	PANGKAL PINANG	PEKANBARU	7,391,000.00	3,936,000.00
297	PANGKAL PINANG	PONTIANAK	6,279,000.00	3,733,000.00
298	PANGKAL PINANG	SEMARANG	5,829,000.00	3,187,000.00
299	PANGKAL PINANG	SOLO	5,829,000.00	3,326,000.00
300	PANGKAL PINANG	SURABAYA	7,284,000.00	3,626,000.00
301	PEKANBARU	PONTIANAK	8,247,000.00	4,514,000.00
302	PEKANBARU	SEMARANG	7,797,000.00	3,979,000.00
303	PEKANBARU	SOLO	7,797,000.00	4,118,000.00
304	PEKANBARU	SURABAYA	9,241,000.00	4,407,000.00
305	PEKANBARU	TIMIKA	16,771,000.00	8,739,000.00
306	PONTIANAK	MAKASAR	9,915,000.00	5,241,000.00
307	PONTIANAK	SEMARANG	6,685,000.00	3,765,000.00

308	PONTIANAK	SOLO	6,685,000.00	3,904,000.00	
309	PONTIANAK	SURABAYA	8,140,000.00	4,204,000.00	
310	PONTIANAK	TIMIKA	15,659,000.00	8,535,000.00	
311	SEMARANG	MAKASAR	9,466,000.00	4,706,000.00	
312	SOLO	MAKASAR	9,466,000.00	4,845,000.00	
313	SURABAYA	DENPASAR	3,198,000.00	1,979,000.00	
314	SURABAYA	JAYAPURA	12,675,000.00	7,231,000.00	
315	SURABAYA	MAKASAR	5,936,000.00	3,433,000.00	
316	SURABAYA	TIMIKA	11,295,000.00	6,589,000.00	
2.3.	SATUAN BIAYA TAXI PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI				
NO	PROVINSI		SATUAN	BESARAN	
1	Aceh		Orang/Kali	123,000	
2	Sumatera Utara		Orang/Kali	232,000	
3	Riau		Orang/Kali	94,000	
4	Kepulauan Riau		Orang/Kali	137,000	
5	Jambi		Orang/Kali	147,000	
6	Sumatera Barat		Orang/Kali	190,000	
7	Sumatera Selatan		Orang/Kali	128,000	
8	Lampung		Orang/Kali	167,000	
9	Bengkulu		Orang/Kali	109,000	
10	Bangka Belitung		Orang/Kali	90,000	
11	Banten		Orang/Kali	446,000	
12	Jawa Barat		Orang/Kali	166,000	
13	DKI Jakarta		Orang/Kali	256,000	
14	Jawa Tengah		Orang/Kali	75,000	
15	DI Yogyakarta		Orang/Kali	118,000	
16	Jawa Timur		Orang/Kali	194,000	
17	Bali		Orang/Kali	159,000	
18	Nusa Tenggara Barat		Orang/Kali	231,000	
19	Nusa Tenggara Timur		Orang/Kali	108,000	
20	Kalimantan Barat		Orang/Kali	135,000	
21	Kalimantan Tengah		Orang/Kali	111,000	
22	Kalimantan Selatan		Orang/Kali	150,000	
23	Kalimantan Timur		Orang/Kali	450,000	
24	Kalimantan Utara		Orang/Kali	102,000	
25	Sulawesi Utara		Orang/Kali	138,000	
26	Gorontalo		Orang/Kali	240,000	
27	Sulawesi Barat		Orang/Kali	313,000	
28	Sulawesi Selatan		Orang/Kali	145,000	
29	Sulawesi Tengah		Orang/Kali	165,000	
30	Sulawesi Tenggara		Orang/Kali	171,000	
31	Maluku		Orang/Kali	240,000	
32	Maluku Utara		Orang/Kali	215,000	
33	Papua		Orang/Kali	431,000	
34	Papua Barat		Orang/Kali	182,000	
2.4.	SATUAN BIAYA TRANSPORTASI DARAT (BBM) DARI KOTA BUKITTINGGI KE KABUPATEN/KOTA DALAM PROVINSI SUMATERA BARAT (PULANG PERGI/PP)				
NO	DAERAH TUJUAN	SATUAN	KENDARAAN DENGAN KAPASITAS SILINDER		
			Diatas 2001 cc (PP)	1601 s.d 2000 cc (PP)	1000 s.d 1600 cc (PP)
1	Kabupaten Mentawai	Ltr/Kend	Disesuaikan	Disesuaikan	Disesuaikan
2	Kabupaten Pasaman	Ltr/Kend	27	23	18
3	Kabupaten Pasaman Barat	Ltr/Kend	53	44	35
4	Kabupaten Pesisir Selatan	Ltr/Kend	50	41	33
5	Kabupaten Dharmasraya	Ltr/Kend	68	56	45
6	Kabupaten Sijunjung	Ltr/Kend	44	36	29
7	Kabupaten Tanah Datar	Ltr/Kend	15	13	10
8	Kabupaten Lima Puluh Kota	Ltr/Kend	18	15	12
9	Kabupaten Solok	Ltr/Kend	33	28	22
10	Kabupaten Solok Selatan	Ltr/Kend	84	69	55
11	Kabupaten Agam :				
12	- Radius sampai 10 km dari pusat kota Bukittinggi	Ltr/Kend	6	3	2
13	- Radius 20 km dari pusat kota Bukittinggi	Ltr/Kend	8	6	4
14	- Lubuk Basung	Ltr/Kend	24	20	16
15	Kabupaten Padang Pariaman (termasuk ke BIM)	Ltr/Kend	29	24	19

16	Kota Payakumbuh	Ltr/Kend	12	10	8
17	Kota Sawah Lunto	Ltr/Kend	32	26	21
18	Kota Pariaman	Ltr/Kend	29	24	19
19	Kota Solok	Ltr/Kend	26	21	17
20	Kota Padang Panjang	Ltr/Kend	8	6	4
21	Kota Padang	Ltr/Kend	35	30	25
2.4.A	SATUAN BIAYA PENGGANTIAN TRANSPORTASI DALAM KOTA BUKITTINGGI PERJALANAN DINAS KURANG DARI 8 (DELAPAN) JAM				
NO	URAIAN			SATUAN	BESARAN
1	Aparatur Sipil Negara / Pegawai Tidak Tetap Pemerintah Kota Bukittinggi			orang/pp	25,000
2	Masyarakat			orang/pp	75,000
3	Aparatur Sipil Negara Instansi Vertikal / TNI / POLRI			orang/pp	150,000
2.4.B	SATUAN BIAYA TRANSPORTASI DARAT DARI IBU KOTA PROVINSI KE KABUPATEN/KOTA DALAM PROVINSI YANG SAMA				
	IBUKOTA PROVINSI	KABUPATEN / KOTA TUJUAN		SATUAN	BESARAN
	ACEH				
1	Banda Aceh	Kab. Aceh Barat		Orang/Kali	275,000
2	Banda Aceh	Kab. Aceh Barat Daya		Orang/Kali	298,000
3	Banda Aceh	Kab. Aceh Besar		Orang/Kali	183,000
4	Banda Aceh	Kab. Aceh Jaya		Orang/Kali	238,000
5	Banda Aceh	Kab. Aceh Selatan		Orang/Kali	325,000
6	Banda Aceh	Kab. Aceh Singkil		Orang/Kali	420,000
7	Banda Aceh	Kab. Aceh Tamiang		Orang/Kali	315,000
8	Banda Aceh	Kab. Aceh Tengah		Orang/Kali	293,000
9	Banda Aceh	Kab. Aceh Tenggara		Orang/Kali	460,000
10	Banda Aceh	Kab. Aceh Timur		Orang/Kali	289,000
11	Banda Aceh	Kab. Aceh Utara		Orang/Kali	270,000
12	Banda Aceh	Kab. Bener Meriah		Orang/Kali	278,000
13	Banda Aceh	Kab. Bireuen		Orang/Kali	220,000
14	Banda Aceh	Kab. Gayo Lues		Orang/Kali	370,000
15	Banda Aceh	Kab. Nagan Raya		Orang/Kali	275,000
16	Banda Aceh	Kab. Pidie		Orang/Kali	190,000
17	Banda Aceh	Kab. Pidie Jaya		Orang/Kali	205,000
18	Banda Aceh	Kota Langsa		Orang/Kali	301,000
19	Banda Aceh	Kota Lhokseumawe		Orang/Kali	240,000
20	Banda Aceh	Kota Subulussalam		Orang/Kali	400,000
	MEDAN				
21	Medan	Kab. Asahan		Orang/Kali	259,000
22	Medan	Kab. Batubara		Orang/Kali	225,000
23	Medan	Kab. Dairi		Orang/Kali	270,000
24	Medan	Kab. Deli Serdang		Orang/Kali	186,000
25	Medan	Kab. Humbang Hasundutan		Orang/Kali	300,000
26	Medan	Kab. Karo		Orang/Kali	200,000
27	Medan	Kab. Labuhan Batu		Orang/Kali	287,000
28	Medan	Kab. Labuhan Batu Selatan		Orang/Kali	360,000
29	Medan	Kab. Labuhan Batu Utara		Orang/Kali	300,000
30	Medan	Kab. Langkat		Orang/Kali	186,000
31	Medan	Kab. Mandailing Natal		Orang/Kali	420,000
32	Medan	Kab. Padang Lawas		Orang/Kali	420,000
33	Medan	Kab. Padang Lawas Utara		Orang/Kali	420,000
34	Medan	Kab. Pakpak Bharat		Orang/Kali	300,000
35	Medan	Kab. Samosir		Orang/Kali	330,000
36	Medan	Kab. Serdang Bedagai		Orang/Kali	200,000
37	Medan	Kab. Simalungun		Orang/Kali	264,000
38	Medan	Kab. Tapanuli Selatan		Orang/Kali	328,000
39	Medan	Kab. Tapanuli Tengah		Orang/Kali	345,000
40	Medan	Kab. Tapanuli Utara		Orang/Kali	330,000
41	Medan	Kab. Toba		Orang/Kali	300,000
42	Medan	Kota Binjai		Orang/Kali	180,000
43	Medan	Kota Pematang Siantar		Orang/Kali	225,000
44	Medan	Kota Sibolga		Orang/Kali	345,000
45	Medan	Kota Tanjung Balai		Orang/Kali	285,000
46	Medan	Kota Tebing Tinggi		Orang/Kali	203,000

	RIAU			
47	Pekan Baru	Kab. Indragiri Hilir	Orang/Kali	380,000
48	Pekan Baru	Kab. Indragiri Hulu	Orang/Kali	315,000
49	Pekan Baru	Kab. Kampar	Orang/Kali	200,000
50	Pekan Baru	Kab. Kuantan Singingi	Orang/Kali	300,000
51	Pekan Baru	Kab. Pelalawan	Orang/Kali	225,000
52	Pekan Baru	Kab. Rokan Hilir	Orang/Kali	350,000
53	Pekan Baru	Kab. Rokan Hulu	Orang/Kali	322,000
54	Pekan Baru	Kab. Siak	Orang/Kali	350,000
55	Pekan Baru	Kota Dumai	Orang/Kali	400,000
	KEPULAUAN RIAU			
56	Tanjung Pinang	Kab. Bintan	Orang/Kali	185,000
	JAMBI			
57	Jambi	Kab. Batanghari	Orang/Kali	175,000
58	Jambi	Kab. Bungo	Orang/Kali	270,000
59	Jambi	Kab. Kerinci	Orang/Kali	325,000
60	Jambi	Kab. Merangin	Orang/Kali	260,000
61	Jambi	Kab. Muaro Jambi	Orang/Kali	170,000
62	Jambi	Kab. Sarolangun	Orang/Kali	241,000
63	Jambi	Kab. Tanjung Jabung Barat	Orang/Kali	225,000
64	Jambi	Kab. Tanjung Jabung Timur	Orang/Kali	190,000
65	Jambi	Kab. Tebo	Orang/Kali	250,000
66	Jambi	Kota Sungai Penuh	Orang/Kali	308,000
	SUMATERA BARAT			
67	Padang	Kab. Agam	Orang/Kali	225,000
68	Padang	Kab. Dharmasraya	Orang/Kali	250,000
69	Padang	Kab. Lima Puluh Kota	Orang/Kali	225,000
70	Padang	Kab. Padang Pariaman	Orang/Kali	205,000
71	Padang	Kab. Pasaman	Orang/Kali	250,000
72	Padang	Kab. Pasaman Barat	Orang/Kali	250,000
73	Padang	Kab. Pesisir Selatan	Orang/Kali	205,000
74	Padang	Kab. Sijunjung	Orang/Kali	225,000
75	Padang	Kab. Solok	Orang/Kali	210,000
76	Padang	Kab. Solok Selatan	Orang/Kali	250,000
77	Padang	Kab. Tanah Datar	Orang/Kali	220,000
78	Padang	Kota Bukit Tinggi	Orang/Kali	215,000
79	Padang	Kota Padang Panjang	Orang/Kali	210,000
80	Padang	Kota Pariaman	Orang/Kali	200,000
81	Padang	Kota Payakumbuh	Orang/Kali	225,000
82	Padang	Kota Sawahlunto	Orang/Kali	215,000
83	Padang	Kota Solok	Orang/Kali	210,000
	SUMATERA SELATAN			
84	Palembang	Kab. Banyuasin	Orang/Kali	203,000
85	Palembang	Kab. Empat Lawang	Orang/Kali	315,000
86	Palembang	Kab. Lahat	Orang/Kali	250,000
87	Palembang	Kab. Muara Enim	Orang/Kali	235,000
88	Palembang	Kab. Musi Banyuasin	Orang/Kali	235,000
89	Palembang	Kab. Musi Rawas	Orang/Kali	320,000
90	Palembang	Kab. Musi Rawas Utara	Orang/Kali	325,000
91	Palembang	Kab. Ogan Ilir	Orang/Kali	205,000
92	Palembang	Kab. Ogan Komering Ilir	Orang/Kali	205,000
93	Palembang	Kab. Ogan Komering Ulu	Orang/Kali	248,000
94	Palembang	Kab. Ogan Komering Ulu Selatan	Orang/Kali	250,000
95	Palembang	Kab. Ogan Komering Ulu Timur	Orang/Kali	245,000
96	Palembang	Kab. Pali	Orang/Kali	265,000
97	Palembang	Kota Lubuk Linggau	Orang/Kali	290,000
98	Palembang	Kota Pagar Alam	Orang/Kali	280,000
99	Palembang	Kota Prabumulih	Orang/Kali	205,000
	LAMPUNG			
100	Bandar Lampung	Kab. Lampung Barat	Orang/Kali	270,000
101	Bandar Lampung	Kab. Lampung Selatan	Orang/Kali	234,000
102	Bandar Lampung	Kab. Lampung Tengah	Orang/Kali	246,000
103	Bandar Lampung	Kab. Lampung Timur	Orang/Kali	246,000
104	Bandar Lampung	Kab. Lampung Utara	Orang/Kali	252,000
105	Bandar Lampung	Kab. Mesuji	Orang/Kali	276,000

106	Bandar Lampung	Kab. Pesawaran	Orang/Kali	216,000
107	Bandar Lampung	Kab. Pesisir Barat	Orang/Kali	200,000
108	Bandar Lampung	Kab. Pringsewu	Orang/Kali	222,000
109	Bandar Lampung	Kab. Tanggamus	Orang/Kali	240,000
110	Bandar Lampung	Kab. Tulang Bawang	Orang/Kali	252,000
111	Bandar Lampung	Kab. Tulang Bawang Barat	Orang/Kali	267,000
112	Bandar Lampung	Kab. Way Kanan	Orang/Kali	270,000
113	Bandar Lampung	Kota Metro	Orang/Kali	234,000
	BENGKULU			
114	Bengkulu	Kab. Bengkulu Selatan	Orang/Kali	344,000
115	Bengkulu	Kab. Bengkulu Tengah	Orang/Kali	232,000
116	Bengkulu	Kab. Bengkulu Utara	Orang/Kali	313,000
117	Bengkulu	Kab. Kaur	Orang/Kali	385,000
118	Bengkulu	Kab. Kepahiang	Orang/Kali	298,000
119	Bengkulu	Kab. Lebong	Orang/Kali	375,000
120	Bengkulu	Kab. Mukomuko	Orang/Kali	423,000
121	Bengkulu	Kab. Rejang Lebong	Orang/Kali	313,000
122	Bengkulu	Kab. Seluma	Orang/Kali	282,000
	BANGKA BELITUNG			
123	Pangkalpinang	Kab. Bangka	Orang/Kali	250,000
124	Pangkalpinang	Kab. Bangka Barat	Orang/Kali	275,000
125	Pangkalpinang	Kab. Bangka Selatan	Orang/Kali	275,000
126	Pangkalpinang	Kab. Bangka Tengah	Orang/Kali	250,000
	BANTEN			
127	Serang	Kab. Lebak	Orang/Kali	208,000
128	Serang	Kab. Pandegelang	Orang/Kali	138,000
129	Serang	Kab. Serang	Orang/Kali	160,000
130	Serang	Kab. Tangerang	Orang/Kali	254,000
131	Serang	Kota Cilegon	Orang/Kali	160,000
132	Serang	Kota Tangerang	Orang/Kali	313,000
133	Serang	Kota Tangerang Selatan	Orang/Kali	347,000
	JAWA BARAT			
134	Bandung	Kab. Bandung	Orang/Kali	183,000
135	Bandung	Kab. Bandung Barat	Orang/Kali	275,000
136	Bandung	Kab. Bekasi	Orang/Kali	265,000
137	Bandung	Kab. Bogor	Orang/Kali	185,000
138	Bandung	Kab. Ciamis	Orang/Kali	245,000
139	Bandung	Kab. Cianjur	Orang/Kali	215,000
140	Bandung	Kab. Cirebon	Orang/Kali	280,000
141	Bandung	Kab. Garut	Orang/Kali	243,000
142	Bandung	Kab. Indramayu	Orang/Kali	275,000
143	Bandung	Kab. Karawang	Orang/Kali	248,000
144	Bandung	Kab. Kuningan	Orang/Kali	275,000
145	Bandung	Kab. Majalengka	Orang/Kali	235,000
146	Bandung	Kab. Pangadaran	Orang/Kali	283,000
147	Bandung	Kab. Purwakarta	Orang/Kali	218,000
148	Bandung	Kab. Subang	Orang/Kali	208,000
149	Bandung	Kab. Sukabumi	Orang/Kali	245,000
150	Bandung	Kab. Sumedang	Orang/Kali	230,000
151	Bandung	Kab. Tasikmalava	Orang/Kali	245,000
152	Bandung	Kota Banjar	Orang/Kali	283,000
153	Bandung	Kota Bekasi	Orang/Kali	265,000
154	Bandung	Kota Bogor	Orang/Kali	285,000
155	Bandung	Kota Cimahi	Orang/Kali	168,000
156	Bandung	Kota Cirebon	Orang/Kali	270,000
157	Bandung	Kota Depok	Orang/Kali	275,000
158	Bandung	Kota Sukabumi	Orang/Kali	226,000
159	Bandung	Kota Tasikmalaya	Orang/Kali	245,000
	JAWA TENGAH			
160	Semarang	Kab. Banjarnegara	Orang/Kali	260,000
161	Semarang	Kab. Banyumas	Orang/Kali	257,000
162	Semarang	Kab. Batang	Orang/Kali	240,000
163	Semarang	Kab. Blora	Orang/Kali	270,000
164	Semarang	Kab. Boyolali	Orang/Kali	240,000
165	Semarang	Kab. Brebes	Orang/Kali	263,000

166	Semarang	Kab. Cilacap	Orang/Kali	280,000
167	Semarang	Kab. Demak	Orang/Kali	230,000
168	Semarang	Kab. Grobogan	Orang/Kali	235,000
169	Semarang	Kab. Jepara	Orang/Kali	240,000
170	Semarang	Kab. Karanganyar	Orang/Kali	250,000
171	Semarang	Kab. Kebumen	Orang/Kali	260,000
172	Semarang	Kab. Kendal	Orang/Kali	230,000
173	Semarang	Kab. Klaten	Orang/Kali	250,000
174	Semarang	Kab. Kudus	Orang/Kali	235,000
175	Semarang	Kab. Magelang	Orang/Kali	240,000
176	Semarang	Kab. Pati	Orang/Kali	240,000
177	Semarang	Kab. Pekalongan	Orang/Kali	245,000
178	Semarang	Kab. Pemalang	Orang/Kali	250,000
179	Semarang	Kab. Purbalingga	Orang/Kali	270,000
180	Semarang	Kab. Purworejo	Orang/Kali	250,000
181	Semarang	Kab. Rembang	Orang/Kali	250,000
182	Semarang	Kab. Semarang	Orang/Kali	230,000
183	Semarang	Kab. Sragen	Orang/Kali	250,000
184	Semarang	Kab. Sukoharjo	Orang/Kali	250,000
185	Semarang	Kab. Tegal	Orang/Kali	260,000
186	Semarang	Kab. Temanggung	Orang/Kali	240,000
187	Semarang	Kab. Wonogiri	Orang/Kali	250,000
188	Semarang	Kab. Wonosobo	Orang/Kali	250,000
189	Semarang	Kota Magelang	Orang/Kali	240,000
190	Semarang	Kota Pekalongan	Orang/Kali	245,000
191	Semarang	Kota Salatiga	Orang/Kali	235,000
192	Semarang	Kota Surakarta	Orang/Kali	245,000
193	Semarang	Kota Tegal	Orang/Kali	260,000
	D.I. YOGYAKARTA			
194	Yogyakarta	Kab. Bantul	Orang/Kali	250,000
195	Yogyakarta	Kab. Gunung Kidul	Orang/Kali	350,000
196	Yogyakarta	Kab. Kulon Progo	Orang/Kali	350,000
197	Yogyakarta	Kab. Sleman	Orang/Kali	200,000
	JAWA TIMUR			
198	Surabaya	Kab. Bangkalan	Orang/Kali	225,000
199	Surabaya	Kab. Banyuwangi	Orang/Kali	285,000
200	Surabaya	Kab. Blitar	Orang/Kali	255,000
201	Surabaya	Kab. Bojonegoro	Orang/Kali	225,000
202	Surabaya	Kab. Bondowoso	Orang/Kali	255,000
203	Surabaya	Kab. Gresik	Orang/Kali	225,000
204	Surabaya	Kab. Jember	Orang/Kali	261,000
205	Surabaya	Kab. Jombang	Orang/Kali	235,000
206	Surabaya	Kab. Kediri	Orang/Kali	235,000
207	Surabaya	Kab. Lamongan	Orang/Kali	225,000
208	Surabaya	Kab. Lumajang	Orang/Kali	261,000
209	Surabaya	Kab. Madiun	Orang/Kali	245,000
210	Surabaya	Kab. Magetan	Orang/Kali	253,000
211	Surabaya	Kab. Malang	Orang/Kali	228,000
212	Surabaya	Kab. Mojokerto	Orang/Kali	225,000
213	Surabaya	Kab. Nganjuk	Orang/Kali	245,000
214	Surabaya	Kab. Ngawi	Orang/Kali	253,000
215	Surabaya	Kab. Pacitan	Orang/Kali	285,000
216	Surabaya	Kab. Pamekasan	Orang/Kali	243,000
217	Surabaya	Kab. Pasuruan	Orang/Kali	228,000
218	Surabaya	Kab. Ponorogo	Orang/Kali	255,000
219	Surabaya	Kab. Probolinggo	Orang/Kali	228,000
220	Surabaya	Kab. Sampang	Orang/Kali	235,000
221	Surabaya	Kab. Sidoarjo	Orang/Kali	240,000
222	Surabaya	Kab. Situbondo	Orang/Kali	255,000
223	Surabaya	Kab. Sumenep	Orang/Kali	255,000
224	Surabaya	Kab. Trenggalek	Orang/Kali	245,000
225	Surabaya	Kab. Tuban	Orang/Kali	245,000
226	Surabaya	Kab. Tulungagung	Orang/Kali	245,000
227	Surabaya	Kota Batu	Orang/Kali	242,000
228	Surabaya	Kota Blitar	Orang/Kali	255,000

229	Surabaya	Kota Bojonegoro	Orang/Kali	225,000
230	Surabaya	Kota Kediri	Orang/Kali	235,000
231	Surabaya	Kota Madiun	Orang/Kali	245,000
232	Surabaya	Kota Malang	Orang/Kali	228,000
233	Surabaya	Kota Mojokerto	Orang/Kali	225,000
234	Surabaya	Kota Probolinggo	Orang/Kali	228,000
	BALI			
235	Denpasar	Kab. Badung	Orang/Kali	188,000
236	Denpasar	Kab. Bangli	Orang/Kali	225,000
237	Denpasar	Kab. Buleleng	Orang/Kali	265,000
238	Denpasar	Kab. Gianyar	Orang/Kali	225,000
239	Denpasar	Kab. Jembrana	Orang/Kali	270,000
240	Denpasar	Kab. Karangasem	Orang/Kali	263,000
241	Denpasar	Kab. Tabanan	Orang/Kali	225,000
	NUSA TENGGARA BARAT			
242	Mataram	Kab. Lombok Barat	Orang/Kali	325,000
243	Mataram	Kab. Lombok Tengah	Orang/Kali	450,000
244	Mataram	Kab. Lombok Timur	Orang/Kali	350,000
	NUSA TENGGARA TIMUR			
245	Kupang	Kab. Belu	Orang/Kali	325,000
246	Kupang	Kab. Kupang	Orang/Kali	175,000
247	Kupang	Kab. Timor Tengah Selatan	Orang/Kali	218,000
248	Kupang	Kab. Timor Tengah Utara	Orang/Kali	275,000
	KALIMANTAN BARAT			
249	Pontianak	Kab. Bengkayang	Orang/Kali	270,000
250	Pontianak	Kab. Kapuas Hulu	Orang/Kali	550,000
251	Pontianak	Kab. Kayong Utara	Orang/Kali	550,000
252	Pontianak	Kab. Ketapang	Orang/Kali	550,000
253	Pontianak	Kab. Kubu Raya	Orang/Kali	185,000
254	Pontianak	Kab. Landak	Orang/Kali	270,000
255	Pontianak	Kab. Melawi	Orang/Kali	430,000
256	Pontianak	Kab. Mempawah	Orang/Kali	230,000
257	Pontianak	Kab. Sambas	Orang/Kali	300,000
258	Pontianak	Kab. Sanggau	Orang/Kali	303,000
259	Pontianak	Kab. Sekadau	Orang/Kali	343,000
260	Pontianak	Kab. Sintang	Orang/Kali	392,000
261	Pontianak	Kota Singkawang	Orang/Kali	257,000
	KALIMANTAN TENGAH			
262	Palangkaraya	Kab. Barito Selatan	Orang/Kali	290,000
263	Palangkaraya	Kab. Barito Timur	Orang/Kali	333,000
264	Palangkaraya	Kab. Barito Utara	Orang/Kali	425,000
265	Palangkaraya	Kab. Gunung Mas	Orang/Kali	300,000
266	Palangkaraya	Kab. Kapuas	Orang/Kali	275,000
267	Palangkaraya	Kab. Katingan	Orang/Kali	250,000
268	Palangkaraya	Kab. Kotawaringin Barat	Orang/Kali	425,000
269	Palangkaraya	Kab. Kotawaringin Timur	Orang/Kali	300,000
270	Palangkaraya	Kab. Lamandau	Orang/Kali	525,000
271	Palangkaraya	Kab. Murung Raya	Orang/Kali	448,000
272	Palangkaraya	Kab. Pulau Pisau	Orang/Kali	250,000
273	Palangkaraya	Kab. Seruyan	Orang/Kali	328,000
274	Palangkaraya	Kab. Sukamara	Orang/Kali	525,000
	KALIMANTAN SELATAN			
275	Banjarmasin	Kab. Balangan	Orang/Kali	230,000
276	Banjarmasin	Kab. Banjar	Orang/Kali	170,000
277	Banjarmasin	Kab. Barito Kuala	Orang/Kali	200,000
278	Banjarmasin	Kab. Hulu Sungai Selatan	Orang/Kali	200,000
279	Banjarmasin	Kab. Hulu Sungai Tengah	Orang/Kali	212,000
280	Banjarmasin	Kab. Hulu Sungai Utara	Orang/Kali	218,000
281	Banjarmasin	Kab. Kota Baru	Orang/Kali	290,000
282	Banjarmasin	Kab.Tabalong	Orang/Kali	234,000
283	Banjarmasin	Kab. Tanah Bumbu	Orang/Kali	300,000
284	Banjarmasin	Kab. Tanah Laut	Orang/Kali	200,000
285	Banjarmasin	Kab. Tapin	Orang/Kali	189,000
286	Banjarmasin	Kota Banjarbaru	Orang/Kali	225,000
	KALIMANTAN TIMUR			

287	Samarinda	Kab. Kutai Barat	Orang/Kali	1,500,000
288	Samarinda	Kab. Kutai Kartanegara	Orang/Kali	500,000
289	Samarinda	Kab. Kutai Timur	Orang/Kali	1,350,000
290	Samarinda	Kab. Paser	Orang/Kali	1,650,000
291	Samarinda	Kab. Penajam Paser Utara	Orang/Kali	650,000
292	Samarinda	Kota Balikpapan	Orang/Kali	550,000
293	Samarinda	Kota Bontang	Orang/Kali	600,000
	SULAWESI UTARA			
294	Manado	Kab. Bolaang Mongondow	Orang/Kali	250,000
295	Manado	Kab. Bolaang Mongondow Selatan	Orang/Kali	275,000
296	Manado	Kab. Bolaang Mongondow Timur	Orang/Kali	250,000
297	Manado	Kab. Bolaang Mongondow Utara	Orang/Kali	300,000
298	Manado	Kab. Minahasa	Orang/Kali	180,000
299	Manado	Kab. Minahasa Selatan	Orang/Kali	180,000
300	Manado	Kab. Minahasa Tenggara	Orang/Kali	200,000
301	Manado	Kab. Minahasa Utara	Orang/Kali	175,000
302	Manado	Kota Bitung	Orang/Kali	175,000
303	Manado	Kota Kotamobagu	Orang/Kali	250,000
304	Manado	Kota Tomohon	Orang/Kali	170,000
	GORONTALO			
305	Gorontalo	Kab. Boalemo	Orang/Kali	400,000
306	Gorontalo	Kab. Gorontalo	Orang/Kali	300,000
307	Gorontalo	Kab. Gorontalo Utara	Orang/Kali	350,000
308	Gorontalo	Kab. Pahuwato	Orang/Kali	650,000
	SULAWESI BARAT			
309	Mamuju	Kab. Majene	Orang/Kali	240,000
310	Mamuju	Kab. Mamasa	Orang/Kali	359,000
311	Mamuju	Kab. Mamuju Tengah	Orang/Kali	200,000
312	Mamuju	Kab. Pasangkayu	Orang/Kali	270,000
313	Mamuju	Kab. Polewali Mandar	Orang/Kali	260,000
	SULAWESI SELATAN			
314	Makasar	Kab. Bantaeng	Orang/Kali	235,000
315	Makasar	Kab. Barru	Orang/Kali	210,000
316	Makasar	Kab. Bone	Orang/Kali	240,000
317	Makasar	Kab. Bulukumba	Orang/Kali	240,000
318	Makasar	Kab. Enrekang	Orang/Kali	250,000
319	Makasar	Kab. Gowa	Orang/Kali	175,000
320	Makasar	Kab. Jenepono	Orang/Kali	230,000
321	Makasar	Kab. Luwu	Orang/Kali	350,000
322	Makasar	Kab. Luwu Timur	Orang/Kali	375,000
323	Makasar	Kab. Luwu Utara	Orang/Kali	365,000
324	Makasar	Kab. Maros	Orang/Kali	170,000
325	Makasar	Kab. Pinrang	Orang/Kali	230,000
326	Makasar	Kab. Sidenreng Rappang	Orang/Kali	230,000
327	Makasar	Kab. Sinjai	Orang/Kali	235,000
328	Makasar	Kab. Soppeng	Orang/Kali	235,000
329	Makasar	Kab. Takalar	Orang/Kali	190,000
330	Makasar	Kab. Tanatoraja	Orang/Kali	350,000
331	Makasar	Kab. Toraja Utara	Orang/Kali	350,000
332	Makasar	Kab. Wajo	Orang/Kali	230,000
333	Makasar	Kota Palopo	Orang/Kali	350,000
334	Makasar	Kota Pare-Pare	Orang/Kali	225,000
	SULAWESI TENGAH			
335	Palu	Kab. Luwuk	Orang/Kali	400,000
336	Palu	Kab. Buol	Orang/Kali	472,000
337	Palu	Kab. Donggala	Orang/Kali	130,000
338	Palu	Kab. Morowali	Orang/Kali	400,000
339	Palu	Kab. Morowali Utara	Orang/Kali	400,000
340	Palu	Kab. Parigi Moutong	Orang/Kali	250,000
341	Palu	Kab. Poso	Orang/Kali	280,000
342	Palu	Kab. Sigi	Orang/Kali	219,000
343	Palu	Kab. Tojouna-Una	Orang/Kali	350,000
344	Palu	Kab. Toli-Toli	Orang/Kali	412,000
	SULAWESI TENGGARA			
345	Kendari	Kab. Bombana	Orang/Kali	355,000

346	Kendari	Kab. Kolaka	Orang/Kali	370,000	
347	Kendari	Kab. Kolaka Timur	Orang/Kali	300,000	
348	Kendari	Kab. Kolaka Utara	Orang/Kali	425,000	
349	Kendari	Kab. Konawe	Orang/Kali	300,000	
350	Kendari	Kab. Konawe Selatan	Orang/Kali	305,000	
351	Kendari	Kab. Konawe Utara	Orang/Kali	300,000	
	MALUKU UTARA				
352	Sofifi	Kab. Halmahera Barat	Orang/Kali	850,000	
353	Sofifi	Kab. Halmahera Tengah	Orang/Kali	1,000,000	
354	Sofifi	Kab. Halmahera Timur	Orang/Kali	1,250,000	
355	Sofifi	Kab. Halmahera Utara	Orang/Kali	900,000	
	PAPUA				
356	Jayapura	Kab. Jayapura	Orang/Kali	600,000	
357	Jayapura	Kab. Keerom	Orang/Kali	900,000	
358	Jayapura	Kab. Sarmi	Orang/Kali	2,700,000	
359	Jayapura	Kab. Merauke	Orang/Kali	1,134,000	
	PAPUA BARAT				
360	Manokwari	Kab. Teluk Bintuni	Orang/Kali	900,000	
361	Manokwari	Kab. Manokwari Selatan	Orang/Kali	750,000	
362	Manokwari	Kab. Pegunungan Arfak	Orang/Kali	2,650,000	
363	Manokwari	Kota Sorong	Orang/Kali	1,000,000	
2.5.	SATUAN BIAYA TRANSPORTASI DARI DKI JAKARTA KE KABUPATEN/KOTA SEKITAR (ONE WAY)				
NO	IBUKOTA PROVINSI	KABUPATEN/KOTA TUJUAN	SATUAN	BESARAN	
1	JAKARTA	KOTA BEKASI	Orang/Kali	284,000	
2	JAKARTA	KAB. BEKASI	Orang/Kali	284,000	
3	JAKARTA	KAB. BOGOR	Orang/Kali	300,000	
4	JAKARTA	KOTA. BOGOR	Orang/Kali	300,000	
5	JAKARTA	KOTA. DEPOK	Orang/Kali	275,000	
6	JAKARTA	KOTA. TANGERANG	Orang/Kali	286,000	
7	JAKARTA	KAB.TANGERANG SELATAN	Orang/Kali	286,000	
8	JAKARTA	KAB. TANGERANG	Orang/Kali	310,000	
9	JAKARTA	KEPULAUAN SERIBU	Orang/Kali	428,000	
C. SATUAN BIAYA KONSUMSI RAPAT					
2.6.	SATUAN BIAYA KONSUMSI RAPAT				
NO	PROVINSI	SATUAN	MAKAN	KUDAPAN (SNACK)	
1	RAPAT KOORDINASI TINGKAT KEPALA DAERAH/ESELON 1/ SETARA	ORANG/KALI	110,000	49,000	
2	RAPAT BIASA	ORANG/KALI	44,000	17,000	
D. SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN					
2.7.	SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN GEDUNG ATAU BANGUNAN DALAM NEGERI				
NO	URAIAN	SATUAN	GEDUNG BERTINGKAT	GEDUNG TIDAK BERTINGKAT	HALAMAN GEDUNG / BANGUNAN KANTOR
1	Pemeliharaan gedung atau bangunan kantor	m ² /tahun	182,000	124,000	10,000
2.8.	SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN KENDARAAN DINAS PEJABAT				
NO	URAIAN	SATUAN		BESARAN	
1	KEPALA DAERAH / WAKIL KEPALA DAERAH / KETUA DPRD	UNIT/TAHUN		41,900,000	
2	ANGGOTA DPRD	UNIT/TAHUN		41,000,000	
3	PEJABAT ESELON I	UNIT/TAHUN		40,000,000	
4	PEJABAT ESELON II	UNIT/TAHUN		39,190,000	
2.9.	SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL				
NO	URAIAN	SATUAN	RODA EMPAT	DOUBLE GARDAN	RODA DUA
1	Pemeliharaan kendaraan dinas operasional	UNIT/TAHUN	34,100,000	36,930,000.00	3,850,000
2.10.	SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN OPERASIONAL DALAM LINGKUNGAN KANTOR, RODA 6 DAN SPEED BOAT				
NO	URAIAN	SATUAN		BESARAN	
1	OPERASIONAL DALAM LINGKUNGAN KANTOR	UNIT/TAHUN		9,750,000	
2	RODA 6	UNIT/TAHUN		37,110,000	

3	SPEED BOAT	UNIT/TAHUN	20,240,000
2.11.	SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN SARANA KANTOR		
NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN
1	INVENTARIS KANTOR	PEGAWAI/TAHUN	80,000
2	PERSONAL COMPUTER / NOTEBOOK	UNIT/TAHUN	730,000
3	PRINTER	UNIT/TAHUN	690,000
4	AC SPLIT	UNIT/TAHUN	610,000
5	GENSET LEBIH KECIL DARI 50 KVA	UNIT/TAHUN	7,190,000
6	GENSET 75 KVA	UNIT/TAHUN	8,640,000
7	GENSET 100 KVA	UNIT/TAHUN	10,150,000
8	GENSET 125 KVA	UNIT/TAHUN	10,780,000
9	GENSET 150 KVA	UNIT/TAHUN	13,260,000
10	GENSET 175 KVA	UNIT/TAHUN	14,810,000
11	GENSET 200 KVA	UNIT/TAHUN	15,850,000
12	GENSET 250 KVA	UNIT/TAHUN	16,790,000
13	GENSET 275 KVA	UNIT/TAHUN	17,760,000
14	GENSET 300 KVA	UNIT/TAHUN	20,960,000
15	GENSET 350 KVA	UNIT/TAHUN	22,960,000
16	GENSET 450 KVA	UNIT/TAHUN	25,620,000
17	GENSET 500 KVA	UNIT/TAHUN	31,770,000

Keterangan :
OJ : Orang/Jam
OH : Orang/Hari
OB : Orang/Bulan
OT : Orang/Tahun
OP : Orang/Paket
OK : Orang/Kegiatan
OR : Orang/Responden
Oter : Orang/Terbitan
OJP : Orang/Jam Pelajaran

WALIKOTA BUKITTINGGI

dto

ERMAN SAFAR

LAMPIRAN III
PERATURAN WALIKOTA BUKITTINGGI
NOMOR 18 TAHUN 2022
TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN WALIKOTA
BUKITTINGGI NOMOR 51 TAHUN 2020 TENTANG
STANDAR HARGA SATUAN PEMERINTAH KOTA BUKITTINGGI

**STANDAR HARGA SATUAN PEMERINTAH KOTA BUKITTINGGI
YANG BERFUNGSI SEBAGAI BATAS TERTINGGI DALAM PERENCANAAN,
DAN / ATAU ESTIMASI DALAM PELAKSANAAN APBD**

NO	URAIAN		
A	HONORARIUM		
3.1.	Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)		
3.1.1	Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) untuk pengadaan barang (konstruksi)		
	a. Nilai pagu dana s.d. Rp 100 Juta	OB	500,000
	b. Nilai pagu dana di atas Rp. 100 Juta sd. Rp. 250 Juta	OB	600,000
	c. Nilai pagu dana di atas Rp. 250 Juta sd. Rp. 500 Juta	OB	750,000
	d. Nilai pagu dana di atas Rp. 500 Juta sd. Rp. 1 Milyar	OB	1,000,000
	e. Nilai pagu dana di atas Rp. 1 Milyar sd. Rp. 2,5 Milyar	OB	1,500,000
	f. Nilai pagu dana di atas Rp. 2,5 Milyar sd. Rp. 5 Milyar	OB	2,000,000
	g. Nilai pagu dana di atas Rp. 5 Milyar sd. Rp. 10 Milyar	OB	2,500,000
	h. Nilai pagu dana di atas Rp. 10 Milyar sd. Rp. 25 Milyar	OB	3,000,000
	i. Nilai pagu dana di atas Rp. 25 Milyar sd. Rp. 50 Milyar	OB	3,500,000
	j. Nilai pagu dana di atas Rp. 50 Milyar sd. 100 Milyar	OB	4,000,000
	k. Nilai pagu dana di atas Rp. 100 Milyar	OB	4,500,000
3.1.2	Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) untuk pengadaan barang (Non konstruksi)		
	a. Nilai pagu dana s.d. Rp 100 Juta	OB	400,000
	b. Nilai pagu dana di atas Rp. 100 Juta sd. Rp. 250 Juta	OB	500,000
	c. Nilai pagu dana di atas Rp. 250 Juta sd. Rp. 500 Juta	OB	600,000
	d. Nilai pagu dana di atas Rp. 500 Juta sd. Rp. 1 Milyar	OB	750,000
	e. Nilai pagu dana di atas Rp. 1 Milyar sd. Rp. 2,5 Milyar	OB	900,000
	f. Nilai pagu dana di atas Rp. 2,5 Milyar sd. Rp. 5 Milyar	OB	1,150,000
	g. Nilai pagu dana di atas Rp. 5 Milyar sd. Rp. 10 Milyar	OB	1,500,000
	h. Nilai pagu dana di atas Rp. 10 Milyar sd. Rp. 25 Milyar	OB	2,000,000
	i. Nilai pagu dana di atas Rp. 25 Milyar sd. Rp. 50 Milyar	OB	2,500,000
	j. Nilai pagu dana di atas Rp. 50 Milyar sd. 100 Milyar	OB	3,000,000
	k. Nilai pagu dana di atas Rp. 100 Milyar	OB	3,500,000
3.1.3	Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) untuk pengadaan jasa (Non konstruksi)		
	a. Nilai pagu dana s.d. Rp 100 Juta	OB	250,000
	b. Nilai pagu dana di atas Rp. 100 Juta sd. Rp. 250 Juta	OB	350,000
	c. Nilai pagu dana di atas Rp. 250 Juta sd. Rp. 500 Juta	OB	450,000
	d. Nilai pagu dana di atas Rp. 500 Juta sd. Rp. 1 Milyar	OB	600,000
	e. Nilai pagu dana di atas Rp. 1 Milyar sd. Rp. 2,5 Milyar	OB	750,000
	f. Nilai pagu dana di atas Rp. 2,5 Milyar sd. Rp. 5 Milyar	OB	900,000
	g. Nilai pagu dana di atas Rp. 5 Milyar sd. Rp. 10 Milyar	OB	1,150,000
	h. Nilai pagu dana di atas Rp. 10 Milyar sd. Rp. 25 Milyar	OB	1,400,000
	i. Nilai pagu dana di atas Rp. 25 Milyar sd. Rp. 50 Milyar	OB	1,750,000
	j. Nilai pagu dana di atas Rp. 50 Milyar sd. 100 Milyar	OB	2,000,000
	k. Nilai pagu dana di atas Rp. 100 Milyar	OB	2,250,000
3.2	Honorarium Pejabat Teknis Kegiatan (PTK) untuk Kegiatan Infrastruktur / Fisik / Konstruksi		
	Nilai Pagu Dana	Satuan	Harga Satuan
	- Kurang Dari Rp. 100 Juta	OBK	150,000
	- Dari Rp. 100 Juta sd. Rp. 250 Juta	OBK	200,000
	- Diatas Rp. 250 juta sd. Rp. 500 juta	OBK	350,000
	- Diatas Rp. 500 juta sd. Rp. 750 juta	OBK	400,000
	- Diatas Rp. 750 juta sd. Rp. 1 Miliar	OBK	500,000
	- Diatas Rp. 1 Miliar sd. Rp. 2,5 Miliar	OBK	650,000
	- Diatas Rp. 2.5 Miliar sd. Rp. 5 Miliar	OBK	750,000
	- Diatas Rp. 5 Miliar s.d Rp. 10 Miliar	OBK	1,000,000
	- Diatas Rp. 10 Miliar s.d 25 Miliar	OBK	1,250,000
	- Diatas Rp. 25 Miliar s.d 50 Miliar	OBK	1,500,000
	- Rp. 50 Miliar s.d 100 Miliar	OBK	1,750,000
	- Diatas 100 Miliar	OBK	2,000,000
3.3	Honorarium Pengelola Pekerjaan Swakelola		
3.3.1	Nilai pagu dana s/d Rp. 200 Juta	Satuan	Harga Satuan
	- Perencana	OBK	250,000

	- Pelaksana				OBK	350,000
	- Pengawas				OBK	250,000
	- Sekretariat				OBK	150,000
3.3.2	Nilai pagu dana diatas Rp. 200 Juta					
	- Perencana				OBK	300,000
	- Pelaksana				OBK	400,000
	- Pengawas				OBK	300,000
	- Sekretariat				OBK	200,000
3.3.3	Honorarium Tim Teknis Perencanaan					
	- Penanggung Jawab				OP	250,000
	- Quantity Surveyor				OP	250,000
	- Drafter				OP	200,000
	- Surveyor				OP	200,000
3.4.	Honorarium Pengelola Barang Milik Daerah					
	NILAI ASET	Satuan	Pejabat Penatausahaan Barang	Pengurus Barang	Pengurus Barang Pembantu	Pembantu Pengurus Barang
	Sampai dengan 1 Miliar	OB	150,000	400,000	375,000	275,000
	Diatas 1 Miliar s/d 2 Miliar	OB	175,000	450,000	400,000	300,000
	Diatas 2 Miliar s/d 5 Miliar	OB	200,000	500,000	450,000	350,000
	Diatas 5 Miliar s/d 10 Miliar	OB	225,000	550,000	500,000	400,000
	Diatas 10 Miliar s/d 20 Miliar	OB	250,000	600,000	550,000	425,000
	Diatas 20 Miliar s/d 30 Miliar	OB	275,000	650,000	575,000	450,000
	Diatas 30 Miliar s/d 50 Miliar	OB	300,000	700,000	600,000	475,000
	Diatas 50 Miliar s/d 75 Miliar	OB	325,000	750,000	625,000	500,000
	Diatas 75 Miliar s/d 150 Miliar	OB	350,000	800,000	650,000	525,000
	Diatas 150 Miliar s/d 300 Miliar	OB	375,000	825,000	650,000	550,000
	Diatas 300 Miliar	OB	400,000	850,000	650,000	575,000
	Pengelola BMD	OB	1,000,000	900,000		850,000
3.5.	Honorarium Kegiatan Lomba-Lomba					
3.5.1	Honorarium Tim Penilai / Juri / Wasit					
	URAIAN	SATUAN	KECAMATAN	KOTA	PROVINSI	NASIONAL
	Tim Penilai / Juri / Wasit	OH	100,000	175,000	250,000	1,000,000
3.5.2	Honorarium Tim Official					
	Uraian				Satuan	Harga Satuan
	Tim Official				OH	150,000
3.5.3	Honorarium Pelatih					
	Uraian				Satuan	Harga Satuan
	- Pelatih Kegiatan Perlombaan di Bidang Olahraga				OH	150,000
	- Pelatih Kegiatan Perlombaan di Bidang Sains				OH	500,000
	- Instruktur				OH	100,000
3.5.4	Honorarium Atlit / Kontingen					
	Uraian				Satuan	Harga Satuan
	Honorarium Atlit/kontingen				OH	50,000
3.5.5	Honorarium Tim Penyusun/Pemeriksa /Pembuat Soal Lomba dan Keabsahan					
	Uraian				Satuan	Harga Satuan
	Honorarium Tim Penyusun/Pemeriksa/Pembuat Soal Lomba dan Keabsahan				OL	100,000
3.5.6	Honorarium Panitia Pertandingan					
	Uraian				Satuan	Harga Satuan
	Honorarium Panitia Pertandingan				OH	150,000
3.6.	Honorarium Pendukung Acara Seremonial / Upacara/ Sosialisasi dan kegiatan sejenisnya					
	Uraian				Satuan	Harga Satuan
	Pembaca Ayat suci Alquran				OK	100,000
	Pembaca Doa				OK	100,000
	Sanggar Kesenian				OK	3,000,000
	Organ Tunggal				OK	2,000,000
	Pramusaji				OK	100,000
	Pelaksana Upacara dan Kegiatan				OK	100,000
	Kareografer / Komposer				OK	5,000,000
	Penata Rias				OK	100,000
	Korsik				OH	100,000
	Instruktur dalam kota				OJ	60,000
3.7.	Honorarium untuk Penyuluh dan Pendamping					
3.7.1	Honorarium Pengurus LPM					
	Uraian				Satuan	Harga Satuan
	- Ketua				OB	500,000

	- Sekretaris		OB	475,000
	- Bendaharan LPM		OB	475,000
3.7.2	Honorarium Ketua RW/ RT			
	Uraian		Satuan	Harga Satuan
	- Ketua RW		OB	500,000
	- Ketua RT		OB	475,000
3.7.3	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan pendampingan kesehatan			
	Uraian		Satuan	Harga Satuan
	- Kader Posyandu Balita		OKL	200,000
	- Kader Posyandu Lansia		OKL	175,000
	- Kader Poskeskel		OKL	425,000
3.7.4	Honorarium Guru MDTA/ TPQ / PQ/ RTQ/ Ponpes/ Guru Swasta / Garin/ Imam Masjid			
	Uraian	Satuan	Harga Satuan	
			Klasifikasi A	Klasifikasi B
			Klasifikasi C	Klasifikasi D/ belum tersertifikasi
	Guru MDTA/ TPQ / PQ/ RTQ/ Ponpes/Guru Swasta	OB	1,000,000	800,000
	- Garin Masjid/ Mushala	OB	500,000	650,000
	- Imam Masjid / Mushala	OB	750,000	500,000
	Honorarium Tenaga Pendukung Kegiatan Safari Ramadhan Kota Bukittinggi			
	- Imam Safari Ramadhan		OH	300,000
3.7.5	Honorarium Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) / Pendamping/Penyelia KUBE / PPKBK / Sub PPKBK / TKSK/ Tagana/ Tenaga Sosial Lainnya / Satlinmas.			
	Uraian		Satuan	Harga Satuan
	Pekerja Sosial Masyarakat (PSM)/Pendamping/Penyelia KUBE/PPKBK/Sub PPKBK/ TKSK/ Tagana/ Tenaga Sosial Lainnya		OB	100,000
	- Satlinmas		OB	200,000
3.7.6	Honorarium Masyarakat yang terlibat dalam Tim/Kepanitiaan kegiatan Pemerintah Daerah			
	Uraian		Satuan	Harga Satuan
	- Masyarakat yang terlibat dalam Tim/Kepanitiaan kegiatan Pemerintah Daerah		OB	100,000
3.7.7	Honorarium Pengurus Penggerak PKK Kota Bukittinggi			
	Uraian		Satuan	Harga Satuan
	- Penanggung Jawab		OK	1,200,000
	- Wakil Penanggung Jawab		OK	1,080,000
	- Ketua		OK	960,000
	- Wakil Ketua Pelaksana		OK	840,000
	- Sekretaris		OK	600,000
	- Anggota		OK	480,000
3.7.8	Honorarium Jumpa Pers			
	Uraian		Satuan	Harga Satuan
	- Jumpa Pers		OK	100,000
3.7.9	Honorarium Penyelenggaraan Jenazah Kasus Bencana/Penyandang Masalah Sosial			
	Uraian		Satuan	Harga Satuan
	- Honorarium penyelenggaraan jenazah		Jenazah	150,000
	- Honorarium penguburan jenazah		Jenazah	450,000
3.7.10	Honorarium Veteran Pejuang untuk menghadiri HUT RI			
	Uraian		Satuan	Harga Satuan
	- Veteran Pejuang untuk menghadiri HUT RI		OH	100,000
3.7.11	Belanja Jasa Advokat Bidang TUN / Perdata / Pidana			
	Uraian		Satuan	Harga Satuan
	- Jasa Advokat Bidang TUN / Perdata / Pidana		Orang/Paket	45,000,000
3.7.12	Belanja Jasa Pembuatan dan Perumusan Produk Hukum			
	Uraian		Satuan	Harga Satuan
	- Jasa Tenaga Ahli Pembuatan Naskah Akademis		Orang/Produk	5,000,000
	- Jasa Tenaga Ahli Pengharmonisasian Rancangan Peraturan Daerah/Perwako		Orang/Produk	1,000,000
3.8.	Honorarium Pendataan, Survey, Pendistribusian / Penyetoran dan Penilaian			
	Uraian		Satuan	Harga Satuan
	- Supervisor			
	s/d 10 item pertanyaan / form isian		form	300
	11 s/d 20 item pertanyaan / form isian		form	600
	21 s/d 30 item pertanyaan / form isian		form	900
	31 s/d 40 item pertanyaan / form isian		form	1,200
	41 s/d 50 item pertanyaan / form isian		form	1,500
	51 s/d 60 item pertanyaan / form isian		form	1,800
	61 s/d 70 item pertanyaan / form isian		form	2,100

	diatas 70 item pertanyaan / form isian	form	2,400
	- Petugas pendata sekaligus penginput data		
	s/d 10 item pertanyaan / form isian	form	1,000
	11 s/d 20 item pertanyaan / form isian	form	2,000
	21 s/d 30 item pertanyaan / form isian	form	3,000
	31 s/d 40 item pertanyaan / form isian	form	4,000
	41 s/d 50 item pertanyaan / form isian	form	5,000
	51 s/d 60 item pertanyaan / form isian	form	6,000
	61 s/d 70 item pertanyaan / form isian	form	7,000
	diatas 70 item pertanyaan / form isian	form	8,000
	- Petugas pendata		
	s/d 10 item pertanyaan / form isian	form	750
	11 s/d 20 item pertanyaan / form isian	form	1,500
	21 s/d 30 item pertanyaan / form isian	form	2,250
	31 s/d 40 item pertanyaan / form isian	form	3,000
	41 s/d 50 item pertanyaan / form isian	form	3,750
	51 s/d 60 item pertanyaan / form isian	form	4,500
	61 s/d 70 item pertanyaan / form isian	form	5,250
	diatas 70 item pertanyaan / form isian	form	6,000
	- Petugas entri data		
	Entri data form isian ke aplikasi :		
	s/d 10 item pertanyaan / form isian	form	500
	11 s/d 20 item pertanyaan / form isian	form	1,000
	21 s/d 30 item pertanyaan / form isian	form	1,500
	31 s/d 40 item pertanyaan / form isian	form	2,000
	41 s/d 50 item pertanyaan / form isian	form	2,500
	51 s/d 60 item pertanyaan / form isian	form	3,000
	61 s/d 70 item pertanyaan / form isian	form	3,500
	diatas 70 item pertanyaan / form isian	form	4,000
	- Pendistribusian SPPT	Lbr SPPT	2,000
	- Penyetoran / Pengembalian SPPT	Lbr SPPT	2,000
	- Penilai Angka Kredit	org/bahan	35,000
3.9.	Honorarium Tim Sidang Pelanggaran Perda		
3.9.1	Honorarium Penegakan Hukum		
	Uraian	Satuan	Harga Satuan
	1. Hakim Pengadilan Negeri	OKss	175,000
	2. Jaksa Eksekutur	OKss	150,000
	3. Panitera	OKss	150,000
	4. Korwas PPNS/KBO Reskrim Polres Bukittinggi	OKss	150,000
	5. PPNS Kota Bukittinggi	OKss	150,000
	6. PAM Eksekutor Putusan Sidang	OKss	100,000
	7. Saksi Ahli Perkara	OKss	150,000
	8. Saksi Perkara	OKss	100,000
3.9.2	Honorarium Penegakan Denda Upaya Paksa		
	Uraian	Satuan	Harga Satuan
	* Petugas Pencatat Barang Bukti	OKss	20,000
	* Petugas Pemeriksa		
	a. Proses Denda	OKss	50,000
	b. Proses Surat Pernyataan	OKss	30,000
3.9.3	Honorarium Kegiatan Operasional Sekretariat Bersama PPNS Lingkungan Pemerintah Kota Bukittinggi		
	Uraian	Satuan	Harga Satuan
	* PNS		
	- Ketua	OB	1,200,000
	- Ketua Harian	OB	1,050,000
	- Wakt Ketua	OB	900,000
	- Korwas PPNS	OB	900,000
	- Sekretaris	OB	900,000
	- Wakil Sekretaris	OB	900,000
	- Koordinator Bidang	OB	600,000
	- Anggota Bidang	OB	450,000
	- Anggota Sekretariat	OB	300,000
	* Non PNS		
	- Penanggung Jawab	OB	1,500,000
	- Wakil Penanggung Jawab	OB	1,300,000
3.9.4	Honorarium Penyelidikan/ Penyidikan		
	Uraian	Satuan	Harga Satuan

	- Pemeriksaan PPNS ke TKP		OKI	150,000	
	- Menghadirkan TSK dan Saksi		OKI	80,000	
	- Penyitaan Barang Bukti		OKI	80,000	
3.9.5	Honorarium Penuntutan/ Sidang di Pengadilan Negeri				
	Uraian	Satuan	Harga Satuan		
	- Hakim	OS	150,000		
	- Kuasa Jaksa	OS	150,000		
	- Panitera PN	OS	100,000		
	- Saksi Ahli	OS	150,000		
	- Saksi Perkara	OS	90,000		
3.9.6	Honorarium Eksekusi/ Pelaksanaan Putusan Pengadilan				
	Uraian	Satuan	Harga Satuan		
	- Jaksa Eksekutor	OS	150,000		
	- Kuasa Jaksa/ Penuntut Umum	OS	150,000		
	- Penyidik PPNS	OS	100,000		
	- Pengamanan Eksekusi	OK	85,000		
	- Sopir Mobil Eksekusi	OK	60,000		
3.10.	Honorarium untuk Instansi Vertikal yang membantu/mendukung program Pemerintah Daerah				
3.10.1.	Honorarium Kegiatan program Pemerintah Daerah yang bersifat Insidentil				
	Uraian	Satuan	Harga Satuan		
	- Petugas Pelaksana Kegiatan Tingkat Kota				
	Penanggung Jawab	OH	100,000		
	Koordinator	OH	90,000		
	Petugas Pelaksana	OH	80,000		
	- Petugas Pelaksana Kegiatan Tingkat Kecamatan				
	Penanggung Jawab	OH	50,000		
	Koordinator	OH	40,000		
	Petugas Pelaksana	OH	30,000		
3.10.2.	Honorarium Kuasa Hukum dari Kejaksaan Negeri				
	Uraian	Satuan	Harga Satuan		
	- Kepala Kejaksaan Negeri	OB	2,500,000		
	- Kasi Pada Kejaksaan Negeri	OB	1,500,000		
	- Jaksa Pengacara Negara	OB	1,000,000		
3.11.	Honorarium Tim Panitia Seleksi Terbuka/Evaluasi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama				
	URAIAN	Satuan	Uraian Harga Satuan		
			1-3 Jabatan	4-6 Jabatan	> 7 Jabatan
	- Ketua (Panitia Seleksi/Evaluasi)	OK	5,500,000	7,500,000	10,000,000
	- Anggota (Panitia Seleksi/Evaluasi)	OK	5,000,000	6,500,000	8,500,000
B	BARANG DAN JASA				
3.12.	Belanja Jasa/Upah Tenaga Kerja				
3.12.1	a.Belanja Jasa Upah Kerja Pegawai Kontrak				
	Uraian	Satuan	Harga Satuan		
	1. Pegawai Kontrak	OB	2,484,041		
	2. Pegawai Kontrak Harian	OH	90,000		
	3. Pegawai Kontrak untuk Pekerjaan Beresiko	OB	2,984,041		
	4. Pegawai Kontrak yang Mempunyai Beban Kerja Lebih	OB	2,984,041		
	5. Pegawai Kontrak Profesional				
	- Tenaga Fasilitator Lapangan (TFL)	OB	3,900,000		
	- Tenaga Programmer dan Perencana	OB	5,000,000		
	6. Pegawai Kontrak Penata Anastesi	OB	4,000,000		
	b.Belanja Jasa Upah Kerja dan Insentif Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD)				
	Upah Pegawai Kontrak Dokter Spesialis	OB	5,000,000		
	Insentif Dokter Spesialis	OB	15,000,000		
	Insentif Dokter Umum / Dokter Gigi / Dokter Intership Non PNS	OB	1,500,000		
	Insentif Apoteker Non PNS	OB	1,250,000		
	Jasa Tenaga Kesehatan Referral Dr. Spesialis	/Hari	1,000,000		
	Jasa Tenaga Kesehatan Referral Dr. Spesialis untuk pelayanan operasi emergency/cyto diluar jam kerja				
	- Operasi Besar	/ Kali	500,000		
	- Operasi sedang dan kecil	/ Kali	300,000		
	c.Belanja Iuran Jaminan / Asuransi				
	iuran jaminan kecelakaan kerja bagi non ASN		sesuai tarif		
	iuran jaminan kematian bagi non ASN		sesuai tarif		
	iuran jaminan kesehatan bagi non ASN		sesuai tarif		
	d. Belanja Jasa Tenaga Keamanan				
	Insentif Ajudan Walikota (Polisi)	OB	2,400,000		
	Jasa Forider Pengamanan (Polisi)	OH	200,000		
	Jasa Tenaga Pengamanan Car Free Day	OK	30,000		
3.12.2	Tunjangan / Uang Kesejahteraan Pegawai Kontrak				

	Uraian	Satuan	Harga Satuan
	Tunjangan Guru Non PNS pada satuan pendidikan tingkat PAUD, TK, SD sederajat, SLTP sederajat di wilayah Kota Bukittinggi dan Pegawai Tidak Tetap/Kontrak yang diperbantukan pada Pemerintah Kota Bukittinggi yang diangkat oleh Menteri/Gubernur atau Pejabat lainnya atas nama Menteri/Gubernur, diberikan kepada Guru Swasta dan Negeri yang tergabung dalam Ikatan Guru Honor Indonesia (IGHI) Kota Bukittinggi.	OB	500,000
	Uang Kesejahteraan Tahunan bagi Guru Non PNS pada satuan pendidikan tingkat PAUD, TK, SD sederajat, SLTP sederajat di wilayah Kota Bukittinggi dan Pegawai harian yang diangkat oleh Walikota Bukittinggi, dikontrak oleh Pimpinan SKPD di Lingkungan Pemerintah Kota Bukittinggi	OT	1,000,000
3.13.	UANG LEMBUR		
	Uraian	Satuan	Harga Satuan
3.13.1	Uang Lembur Hari Kerja / Hari Libur Biasa		
	- PNS Golongan IV	OJ	13,000
	- PNS Golongan III	OJ	10,500
	- PNS Golongan II	OJ	8,500
	- PNS Golongan I	OJ	7,500
	- Non PNS / Pegawai Tidak Tetap	OJ	7,500
	- Danru / PTI PNS	OJ	10,500
	- Wadanru PNS	OJ	9,000
	- Danru / Wadanru Non PNS	OJ	8,000
3.13.2	Uang Lembur Khusus Hari-Hari Tertentu		
	Uraian	Satuan	Harga Satuan
	- Uang Lembur Khusus SKPD	OH	200,000
	- Uang Lembur Khusus Pantap	OH	250,000
	- Uang lembur Khusus Tata Usaha Pimpinan (TUP) untuk Non ASN	OH	25,000
3.13.3	Uang Makan Lembur		
	- Uang Makan Lembur	OH	25,000
3.14.	Belanja Jasa Kantor		
	Belanja Jasa Pemeliharaan		
3.14.1	Satuan Biaya Pemeliharaan Operasional Pengelolaan Sampah		
	Uraian	Satuan	Harga Satuan
	Kendaraan operasional pengelolaan/pengangkutan sampah		
	a. Betor	Unit/Tahun	28,476,250
	b. Dump Truck	Unit/Tahun	218,462,000
	c. Telescopic	Unit/Tahun	236,672,500
	d. Skeed Loader	Unit/Tahun	242,672,500
	e. Gerobak :		
	- Gerobak 1 (satu) roda	Unit/Tahun	280,000
	- Gerobak 2 (dua) roda	Unit/Tahun	500,000
	f. Road Sweper	Unit/Tahun	171,998,000
	g. Mesin Potong Rumput	Unit/Tahun	8,010,000
	h. Mesin Chain Shaw	Unit/Tahun	5,465,000
	i. Mesin Penyiram	Unit/Tahun	16,400,000
	j. Mesin Apung	Unit/Tahun	3,850,000
	k. Perahu Karet	Unit/Tahun	2,000,000
3.15.	Belanja Jasa Pengumuman / Publikasi		
3.15.1	Belanja Jasa Pengumuman / Publikasi di Media Cetak Harian		
	Uraian	Satuan	Harga Satuan
	Ukuran 1 halaman warna	kali	8,000,000
	Ukuran 1 halaman hitam putih	kali	6,000,000
	Ukuran 1/2 halaman warna	kali	4,000,000
	Ukuran 1/2 halaman hitam putih	kali	3,000,000
	Ukuran 1/4 halaman warna	kali	2,000,000
	Ukuran 1/4 halaman hitam putih	kali	1,500,000
	Liputan Khusus halaman depan	kali	3,000,000
	Laporan Bersambung/Edisi (iklan komersial ukuran 2 kolom, 1x8 cm)	kali	100,000
	Iklan / Apresiasi Warna Hitam Putih	kali	1,000,000
	Iklan / Apresiasi Hitam Putih	kali	500,000
3.15.2	Belanja Jasa Pengumuman / Publikasi di Media Cetak Harian Tabloid		
	Ukuran 1 halaman warna	kali	3,000,000
	Ukuran 1 halaman hitam putih	kali	2,000,000
	Ukuran 1/2 halaman warna	kali	1,500,000
	Ukuran 1/2 halaman hitam putih	kali	1,000,000
	Ukuran 1/4 halaman warna	kali	1,000,000
	Ukuran 1/4 halaman hitam putih	kali	500,000
	Liputan Khusus halaman depan	kali	3,000,000

	Laporan Bersambung/Edisi (iklan komersial ukuran 2 kolom, 1x8 cm)	kali	100,000
	Iklan / Apresiasi Warna Hitam Putih	kali	1,000,000
	Iklan / Apresiasi Hitam Putih	kali	500,000
3.15.3	Belanja Jasa Pengumuman / Publikasi di Media Cetak Mingguan		
	Ukuran 1 halaman warna	kali	3,500,000
	Ukuran 1 halaman hitam putih	kali	3,000,000
	Ukuran 1/2 halaman warna	kali	2,000,000
	Ukuran 1/2 halaman hitam putih	kali	1,500,000
	Ukuran 1/4 halaman warna	kali	1,250,000
	Ukuran 1/4 halaman hitam putih	kali	750,000
	Iklan / Apresiasi Hitam Putih	kali	500,000
3.15.4	Belanja Jasa Pengumuman / Publikasi di Media Cetak Mingguan Tabloid		
	Ukuran 1 halaman warna	kali	3,500,000
	Ukuran 1 halaman hitam putih	kali	3,000,000
	Ukuran 1/2 halaman warna	kali	2,000,000
	Ukuran 1/2 halaman hitam putih	kali	1,500,000
	Ukuran 1/4 halaman warna	kali	1,250,000
	Ukuran 1/4 halaman hitam putih	kali	750,000
	Iklan / Apresiasi Hitam Putih	kali	500,000
3.15.5	Belanja Jasa Pengumuman / Publikasi di Majalah Nasional		
	Ukuran 1 halaman	kali	1,500,000
	Ukuran 1/2 halaman	kali	750,000
3.15.6	Belanja Jasa Pengumuman / Publikasi di Media Online		
	Ukuran 1 Kali Tayang	kali	150,000
	Iklan / Apresiasi	kali	100,000
3.15.7	Liputan Kegiatan Pemko		
	Media Cetak	OM	150,000
	Media Elektronik	OM	200,000
	Media Siaran Langsung Radio	kali	1,500,000
	Media TV Nasional	1	ls
	Biaya Penggantian Berita/Foto/Kegiatan Pemerintah Kota yang dimuat wartawan dalam media cetak, elektronik dan online	kali	20,000
	Rekaman Pidato	kali	500,000
3.15.8	Iklan		
	Pembuatan spot iklan layanan di radio	kali	100,000
	Berita/iklan layanan di media internet/website	kali	100,000
	Pembuatan spot/iklan layanan TV		Sesuai Tarif
3.16.	Belanja Surat Kabar dan Majalah		sesuai tarif
3.17.	Belanja Jasa Kawat/ Faximili / Internet		sesuai tarif
3.18.	Belanja Tagihan Telepon		Sesuai Tarif
3.19.	Belanja Tagihan Air		Sesuai Tarif
3.20.	Belanja Tagihan Listrik		Sesuai Tarif
3.21.	Belanja Penambahan Daya		Sesuai Tarif
3.22.	Belanja Jasa Pemasangan Instalasi Telepon,Air, dan Listrik		Sesuai Tarif
3.23.	Belanja Jasa Konsultansi		LS
3.24.	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara		Sesuai Tarif
3.25.	Belanja Jasa Penggantian Kerugian		Sesuai hasil keputusan pemeriksaan dan penelitian
3.26.	Belanja Paket/ Pengiriman		sesuai tarif
3.27.	Belanja Jasa Kebersihan Ruangan		
	Uraian	Satuan	Kapasitas Ruangan
			BesarSedangKecil
	Belanja Jasa Kebersihan Ruangan	Tempat/Hari	250,000150,000100,000
3.28.	Belanja Sewa Ruang / Rumah / Gedung Pertemuan		
	Sewa Stand Pameran		Sesuai Tarif
	Sewa Ruang Rapat / Pertemuan Biasa	RH	500,000
	Sewa Ruang Rapat / Pertemuan Kecil		Sesuai Tarif
	Sewa Ruang Rapat / Pertemuan Sedang		Sesuai Tarif
	Sewa Ruang Rapat / Pertemuan Besar		Sesuai Tarif
3.29.	Belanja Sewa Lainnya Khusus Sekretariat Daerah		
	Sewa Papan Bunga Biasa	Unit	250,000
	Sewa Papan Bunga Akrilik	Unit	300,000
3.30.	Belanja Makanan dan Minuman		
	Uraian	Satuan	Harga Satuan

	- Belanja Makanan dan Minuman Harian/Lembur								
	Makan			Porsi	25,000				
	Minum			Porsi	15,000				
	- Belanja Makanan dan Minuman Rapat/Pertemuan/Diklat/Tamu/Kegiatan								
	Makan								
	Makan berupa nasi bungkus			Porsi	25,000				
	Makan berupa nasi kotak lengkap / jasa catering			Porsi	30,000				
	Makan untuk kegiatan/event internasional			Porsi	150,000				
	Snack								
	Snack Biasa			Porsi	8,000				
	Snack Sedang / Snack dengan menggunakan jasa catering			Porsi	12,500				
	Snack Berat			Porsi	15,000				
	Snack untuk kegiatan/event internasional			Porsi	49,000				
	- Kegiatan Rapat / Pertemuan Unsur Pimpinan Daerah / Pimpinan SKPD (Coffee Morning)				Sesuai Tarif				
	- Kunjungan Tamu Pemerintah Daerah / Tamu Rumah Dinas Walikota dan Wakil Walikota				Sesuai Tarif				
	- Kegiatan Penerimaan Tamu Pemerintah Daerah di Rumah Makan/Restoran/ Hotel				Sesuai Tarif				
	- Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Field Trip								
	Biaya Konsumsi			OH	25,000				
	- Belanja Manan dan Minuman Jamuan Tamu Kepala Daerah								
	Makan			Porsi	110,000				
	Kudapan (Snack)			Porsi	49,000				
	- Belanja Manan dan Minuman Jamuan Sekretaris Daerah								
	Makan			Porsi	90,000				
	Kudapan (Snack)			Porsi	30,000				
3.31.	Belanja Pakaian Dinas Khusus								
	Belanja Pakaian Kerja			Satuan	Harga Satuan				
	Pakaian Kerja Khusus				Sesuai Tarif				
3.32.	Uang /Barang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat / Pihak Ketiga								
3.32.1	Hadiah Lomba / Penghargaan (Reward)								
	a. Hadiah Lomba Perorangan								
	Tingkatan Juara Lomba			Satuan	Tingkat Kecamatan	Tingkat Kota			
	Juara I			PL	400,000	750,000			
	Juara II			PL	300,000	500,000			
	Juara III			PL	250,000	300,000			
	Harapan I			PL		250,000			
	Harapan II			PL		200,000			
	Harapan III			PL		100,000			
	b. Hadiah Lomba Grup								
	Tingkatan Juara Lomba	Satuan	Grup Tingkat Kecamatan			Grup Tingkat Kota			
			2-3 orang	4-5 orang	6 orang atau lebih	2-3 orang	4-5 orang	6 orang atau lebih	
	Juara I	PL	750,000	1,250,000	2,000,000	1,500,000	2,500,000	4,000,000	
	Juara II	PL	600,000	1,000,000	1,600,000	1,200,000	2,000,000	3,200,000	
	Juara III	PL	450,000	750,000	1,200,000	900,000	1,500,000	2,400,000	
	Harapan I	PL	300,000	500,000	800,000	500,000	800,000	1,500,000	
	Harapan II	PL	200,000	350,000	600,000	400,000	600,000	1,000,000	
	Harapan III	PL	100,000	200,000	400,000	300,000	400,000	750,000	
3.32.2	Uang Penghargaan Atas Prestasi Siswa								
	a. Peraih Nilai Ujian Nasional Terbaik								
	Tingkatan Juara Lomba			Satuan	SD/MI	SMP/	SMA/ Sederajat		
	- Juara I			Org.	1,000,000	1,500,000	2,000,000		
	- Juara II			Org.	900,000	1,300,000	1,800,000		
	- Juara III			Org.	800,000	1,100,000	1,600,000		
	b. Pemenang Lomba Mewakili Kota Bukittinggi								
	Tingkatan Juara Lomba			Satuan	Provinsi	Nasional	Internasional		
	Pemenang Lomba Mewakili Kota Bukittinggi			Org.			5,000,000		
	- Juara I			Org.	1,000,000	2,000,000			
	- Juara II			Org.	800,000	1,500,000			
	- Juara III			Org.	600,000	1,000,000			
	Duo			Grup			2,500,000		
	Kelompok (grup) Jumlah personil minimal 3 orang			Grup	3,000,000	5,000,000	10,000,000		
	c. Uang Penghargaan Untuk Guru Berprestasi								
				Satuan	Kota	Provinsi	Nasional		

	Penghargaan Guru Berprestasi		Org.	5,000,000	7,500,000	10,000,000		
3.32.3	Hadiah Pemenang Seleksi Duta Pelajar/Mahasiswa Genre							
	Tingkatan Juara Lomba	Satuan	Kota	Provinsi	Nasional			
	- Juara I (Pa-Pi)	Orang	2,500,000					
	- Juara II (Pa-Pi)	Orang	1,500,000					
	- Juara III (Pa-Pi)	Orang	1,000,000					
	- Juara Kategori (Pa-Pi)	Orang	500,000					
3.32.4	Hadiah Lomba Kepariwisataaan							
	a. Hadiah Pemilihan Duta Wisata Bujang Jo Gadih							
	Tingkatan Juara Lomba	Satuan	Kota	Provinsi	Nasional			
	Juara I Bujang Bukittinggi	Orang	1,500,000					
	Juara I Gadih Bukittinggi	Orang	1,500,000					
	Wakil I Bujang Bukittinggi	Orang	1,250,000					
	Wakil I Gadih Bukittinggi	Orang	1,250,000					
	Wakil II Bujang Bukittinggi	Orang	1,000,000					
	Wakil II Gadih Bukittinggi	Orang	1,000,000					
	Bujang Favorit	Orang	750,000					
	Gadih Favorit	Orang	750,000					
	Duta Intelegensi	Orang	750,000					
	Duta Persahabatan	Orang	750,000					
	b. Hadiah Lomba Lagu Perorangan Tingkat Kota							
	Tingkatan Juara Lomba	Satuan	Kota	Provinsi	Nasional			
	Pemenang I (Pa dan Pi)	Orang	1,250,000					
	Pemenang II (Pa dan Pi)	Orang	1,000,000					
	Pemenang III (Pa dan Pi)	Orang	750,000					
	Harapan I (Pa dan Pi)	Orang	500,000					
	Harapan II (Pa dan Pi)	Orang	500,000					
	c. Hadiah Lomba Lagu Perjuangan Siswa/Siswi Tingkat SLTP dan Tingkat SLTA se-Kota Bukittinggi							
	Tingkatan Juara Lomba	Satuan	Kota	Provinsi	Nasional			
	Hadiah Pemenang I (Pa/Pi)	Orang	1,250,000					
	Hadiah Pemenang II (Pa/Pi)	Orang	1,000,000					
	Hadiah Pemenang III (Pa/Pi)	Orang	750,000					
	Hadiah Harapan I (Pa/Pi)	Orang	500,000					
	Hadiah Harapan II (Pa/Pi)	Orang	500,000					
	d. Penghargaan Atas Prestasi Siswa							
	Hadiah Lomba Mewakili Kota Bukittinggi							
	Tingkatan Juara Lomba	Satuan	Kota	Provinsi	Nasional			
	Pemenang Lomba Mewakili Kota Bukittinggi	Org.			5,000,000			
	- Juara I	Org.	1,000,000	2,000,000				
	- Juara II	Org.	800,000	1,500,000				
	- Juara III	Org.	600,000	1,000,000				
	Duo	Grup			2,500,000			
	Kelompok (grup) Jumlah personil minimal 3 orang	Grup	3,000,000	5,000,000	10,000,000			
	e. Hadiah Lomba Fotografi Pariwisata Tingkat Provinsi							
	Tingkatan Juara Lomba		Satuan	Pelajar	Umum			
	Juara I		Orang	2,500,000	7,500,000			
	Juara II		Orang	2,000,000	5,000,000			
	Juara III		Orang	1,500,000	3,000,000			
	Harapan I		Orang	1,000,000	1,500,000			
	Harapan II		Orang	750,000	1,000,000			
	Harapan III		Orang	500,000	750,000			
3.32.5	Belanja Barang yang akan diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga							
	Hadiah Lomba Perorangan							
		Satuan	JUARA					
	Hadiah Lomba Kelurahan Berprestasi Tingkat Kota Bukittinggi (Berupa Barang / Tropi / Bingkisan)		I	II	III			
		PL	250,000	200,000	150,000			
3.32.6	Uang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat/ Pihak Ketiga							
	a. Hadiah Lomba Perorangan							
	URAIAN	Satuan	JUARA					
			I	II	III	Harapan I	Harapan II	Harapan III
	Lomba Kelurahan Berprestasi Tingkat Kota Bukittinggi	PL	35,000,000	12,500,000	7,500,000			
	Lomba Lurah Terbaik Tingkat Kota Bukittinggi	PL	7,500,000	3,500,000	2,500,000			
	Lomba Sekretaris Lurah Terbaik Kota Bukittinggi	PL	5,000,000	2,500,000	1,500,000			

	Lomba Camat Terbaik	PL	8,000,000					
	Lomba Sekretaris Camat Terbaik	PL	5,500,000					
	Penyelenggara Manunggal Sakato Terbaik	PL	7,500,000	5,000,000	2,500,000			
	Lomba Didikan Subuh Tingkat Kota	PL	10,000,000	7,500,000	5,000,000	3,000,000	2,500,000	2,000,000
	Kader Posyandu Berprestasi Tingkat Kota	PL	3,000,000	2,500,000	2,000,000	1,500,000	1,000,000	750,000
	b. Penghargaan / Hadiah Terkait Dengan Kegiatan / Perlombaan Yang Diselenggarakan Oleh Masyarakat							
	URAIAN			JUARA				
				SATUAN	UMUM	I	II	III
	Hadiah Kegiatan Khatam Al Qur'an			PL	1,000,000	800,000	500,000	300,000
	Hadiah Lomba MTQ Kota Bukittinggi			OK	-	1,000,000	600,000	400,000
	c. Reward Kader yang Membawa Akseptor KB IUD Implant pada Pelayanan Serentak							
	URAIAN						SATUAN	HARGA SATUAN
	Reward Kader yang Membawa Akseptor KB IUD Implant pada Pelayanan Serentak						Org/ Akseptor	50,000
	d. Hadiah Lomba / Penghargaan Lainnya							
	URAIAN			JUARA				
				SATUAN	UMUM	I	II	III
	Hadiah Perlombaan Lainnya			PL	850,000	750,000	500,000	300,000
3.32.7	Belanja Barang yang akan diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga							
	a. Hadiah Lomba Perorangan							
	URAIAN				Satuan	JUARA		
						I	II	III
	Hadiah Lomba Kelurahan Berprestasi Tingkat Kecamatan (Berupa Barang / Tropi / Bingkisan)				PL	150,000	100,000	75,000
	b. Kegiatan Posyandu							
	URAIAN						Satuan	Harga Satuan
	Pemberian makan tambahan Posyandu Balita / Lansia						Posyandu/Kegi	75,000
3.32.8	Uang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat/ Pihak Ketiga							
	a. Hadiah Lomba / Penghargaan Lomba							
	URAIAN				Satuan	JUARA		
						I	II	III
	- Lomba Kelurahan Berprestasi Tingkat Kecamatan				PL	2,500,000	1,500,000	1,000,000
	- Lomba Lurah Terbaik Tingkat Kecamatan				PL	3,000,000	2,500,000	1,500,000
	- Lomba Sekretaris Lurah Terbaik Tingkat Kecamatan				PL	2,500,000	2,000,000	1,000,000
	b. Uang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat/ Pihak Ketiga /Penghargaan (Reward)							
	KELURAHAN							
	Pencapaian Target Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)						Realisasi Penerimaan 100% Wajib Pajak 65%	
	(Rupiah)						September	November
	a	-	s/d	100,000,000			4,000,000	3,000,000
	b	100,000,001	s/d	200,000,000			5,000,000	4,000,000
	c	200,000,001	s/d	300,000,000			6,000,000	5,000,000
	d	300,000,001	s/d	400,000,000			7,000,000	6,000,000
	e	Pencapaian target di atas		400,000,000			8,000,000	7,000,000
	KECAMATAN							
	Pencapaian Target Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Realisasi Penerimaan 100% seluruh Kelurahan						4,000,000	3,000,000
	c. Uang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat/ Pihak Ketiga							
	Hadiah Lomba / Penghargaan (Reward)							
	Uraian						Satuan	Harga Satuan
	Juara I						PL	10,000,000
	Juara II						PL	8,000,000
	Juara III						PL	7,000,000
	Harapan I						PL	5,000,000
	Harapan II						PL	4,000,000
	Harapan III						PL	3,500,000
	Penghargaan kepada peserta yang dokumennya diserahkan kepada panitia						Peserta	400,000
3.33.	Belanja Bahan Bakar Minyak / Gas							
	1 BBM Operasional/Mobilitas Rutin Bulanan							
	a. Pejabat Negara , Pejabat Daerah dan PNS Tk. A di Daerah							
	Walikota, Wakil Walikota, Ketua DPRD, Wakil Ketua DPRD dan Sekretaris Daerah						Ltr/Kend	Sesuai Kebutuhan
	b. Pejabat Struktural							
							Satuan	Harga Satuan
	Eselon II.b						Liter/Hari	5

	Eselon III.a	Liter/Hari	4
	Eselon III.b / Penyetaraan Fungsional (Koordinator)	Liter/Hari	3.5
	Eselon IV/ Penyetaraan Fungsional (Sub Koordinator)	Liter/Hari	1.5
	Eselon V	Liter/Hari	1
		Satuan	Harga Satuan
	c. Bendahara, Pengurus Barang/Surat Berharga, Pengawas Pendidikan, Penilik Pendidikan, Caraka, Pengawas Bangunan, Pengawas Alat Berat dan PPTK Konstruksi serta Pejabat Fungsional Tertentu lainnya.	Liter/Hari	1
	BBM Operasional/Mobilitas Rutin Bulanan hanya diberikan untuk Kendaraan Dinas		
	2 Operasional/Mobilitas Terkait Dengan Kegiatan SKPD (Non Rutin Bulanan)		
	a. Kendaraan Dinas Operasional / Kendaraan Dinas Standby		
		Satuan	Harga Satuan
	Kendaraan Dinas Roda 4		
	- Kapasitas Silinder > 2001 cc	Ltr/Kend	4
	- Kapasitas Silinder 1601 s/d 2000 cc	Ltr/Kend	3.5
	- Kapasitas Silinder 1000 s/d 1600 cc	Ltr/Kend	3
	Kendaraan Dinas Roda 2	Ltr/Kend	1
	Kendaraan Dinas Roda 2 Patwal (Dinas Perhubungan)	Ltr/Kend	1.5
	b. Pengawalan Khusus Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah		
	Pengawalan Khusus Walikota/Wakil Walikota	Ltr/Kend	Sesuai Kebutuhan
	BBM Operasional/Mobilitas Terkait Dengan Kegiatan SKPD (Non Rutin Bulanan) hanya diberikan untuk Kendaraan Dinas.		
	Penggunaan jenis BBM mengacu pada Pasal 41 huruf q angka 1 huruf d)		
3.34.	Belanja Jasa Rumah Sakit Umum Daerah		
		Satuan	Harga Satuan
	1. Belanja Jasa Evaluasi Thermoluminisence Dosemeter (TLD) Radiologi	orang / alat	175,000
	2. Belanja Jasa Penata Anastesi tidak tetap	pasien	250,000
	3. Belanja Jasa Pengolahan Darah		sesuai tarif
	4. Belanja Jasa Laboratorium		sesuai tarif
	5. Belanja Jasa Radiologi		sesuai tarif
	6. Belanja Jasa Kalibrasi Alat Kesehatan		sesuai tarif
	7. Belanja Jasa Pemeliharaan Alat Kesehatan		sesuai tarif
	8. Belanja Jasa Pengangkutan dan Pengolahan Limbah Medis/Limbah B3		sesuai tarif
	9. Belanja Jasa Pemeliharaan Instalasi Gas Medis		sesuai tarif

WALIKOTA BUKITTINGGI

dto

ERMAN SAFAR

LAMPIRAN IV
PERATURAN WALIKOTA BUKITTINGGI
NOMOR 18 TAHUN 2022
TENTANG
PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN
WALIKOTA NOMOR 51 TAHUN 2020
TENTANG STANDAR HARGA SATUAN
PEMERINTAH KOTA BUKITTINGGI

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK
NOMOR :

NOMOR :
Nama SKPD :
Nama Kegiatan :
Nama Standar Satuan Harga :
Tahun Anggaran :

Yang bertanda tangan dibawah ini, saya selaku Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna Anggaran*, menyatakan bahwa saya bertanggungjawab penuh atas penggunaan standar harga satuan di luar standar harga satuan yang ditetapkan oleh Walikota Bukittinggi dalam menggunakan menyusun standar satuan harga tersebut diatas merujuk ketentuan Peraturan Walikota Bukittinggi Standar Harga Satuan Pemerintah Kota Bukittinggi pasal 41A.

Apabila terjadi kerugian keuangan negara dan/atau daerah, Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna Anggaran* bertanggung jawab sesuai dengan wewenang, tugas pokok dan fungsi, serta peraturan perundang-undangan.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Bukittinggi,20. ...

Pengguna Anggaran / Kuasa
Pengguna Anggaran*

Nama
NIP.

- Coret yang tidak perlu

WALIKOTA BUKITTINGGI,

dto

ERMAN SAFAR